

**ARAHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KECAMATAN
BINAMU KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Oleh

AMELIYA MAGFIRAH

NIM 45 18 042 039



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

**ARAHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

AMELIYA MAGFIRAH

4518042039

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ARAHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

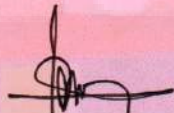
Disusun dan diajukan oleh

AMELIYA MAGFIRAH
NIM. 45 18 042 039

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 19 Agustus 2022

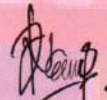
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Syafri, ST., M.Si
NIDN: 09-050768-04

Pembimbing II



Rusneni Ruslan, S.T., M.Si
NIDN: 09-150386-02

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. H. Nasrullah, ST., M.T.
NIDN: 090-80773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN: 09-110774-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.1139/SK/FT/UNIBOS/VIII/2022 Pada Tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022

Skripsi Atas Nama : Ameliya Magfirah

Nomor Pokok : 4518042039

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

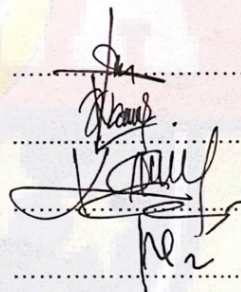
TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syafri, S.T, M.Si

Sekretaris : Rusneni Ruslan, S.T., M.Si

Anggota : 1. Dr. S. Kamran Aksa, S.T, M.T

2. Ir. Rahmawati Rahman, M.Si



DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. H. Nasrullah, S.T., MT
NIDN : 0908077301

KETUA PROGRAM STUDI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. S. Kamran Aksa, S.T., MT
NIDN : 0911077401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMELIYA MAGFIRAH
Nim : 45 18 042 039
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar karya saya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi / sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Ameliya Magfirah

ABSTRAK

Ameliya Magfirah, 2022 “Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Dibimbing oleh Syafri dan Rusneni Ruslan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis faktor penyebab kumuh dan menentukan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *mix method*. Untuk menganalisis faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menggunakan alat analisis *Analytical Hierarchy Process* sedangkan untuk merumuskan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil *Analytical Hierachy Process* menunjukkan bahwa faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yaitu faktor sosial ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat, tidak meratanya pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan dan arahan pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Arahan pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu untuk variabel urbanisasi yaitu pencegahan dengan pola pengawasan dan pengendalian sedangkan untuk variabel lahan perkotaan dengan konsep peningkatan kualitas dengan pola pemugaran. Untuk variabel sarana prasarana dengan arahan penanganan berupa pencegahan dan peningkatan kualitas dengan pola pengawasan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat, pemugaran, dan peremajaan. Untuk variabel sosial budaya dengan arahan penanganan berupa pencegahan dengan pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk variabel tata ruang dengan arahan pencegahan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Arahan, Pencegahan, Peningkatan Permukiman Kumuh

KATA PENGANTAR

Bismilillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Tidak pernah cukup rasa syukur yang penulis panjatkan atas limpahan nikmat dari Allah SWT. Termasuk nikmat untuk merasakan bangku kuliah di kampus ini dan diakhiri dengan selesainya penulisan tugas akhir ini dengan judul "**Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**". Sebuah tahap dalam hidup untuk mematangkan diri dan mengambil bekal untuk tahap selanjutnya.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta **Basmawati** dan Ayahanda tersayang **Muhammad Syarif, S.H** serta saudara/i **Wiwiek Handayani** dan **Muhammad Taufik Akbar** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. **Bapak Dr. H. Nasrullah, ST. MT.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar;
3. **Bapak Dr. S. Kamran Aksa, ST. MT.** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar dan tak henti-hentinya memberikan bantuan kepada penulis, terima kasih;
4. **Bapak Dr. Syafri, S.T., M.Si**, selaku pembimbing pertama yang telah bersedia mendorong, membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini;
5. **Ibu Rusneni Ruslan, S.T., M.Si** selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing, dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.;
6. **Bapak Muh. Idris Taking, S.T, MSP dan Bapak Emil Salim Rasyidi, S.T, M.S.c**, yang telah bersedia membimbing, membantu, mengarahkan, mendorong penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. **Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku kuliah sejak awal hingga selesai;
8. **Bappeda Kabupaten Jeneponto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto,**

Lurah Kelurahan Pabiringa, dan Ketua Lingkungan Tanrusampe

yang bersedia untuk diwawancarai serta memberikan data dan pengetahuan tentang lokasi penelitian;

9. Kepada **Bapak Yan Grasia Alfa, ST** selaku **Kasubang Perencanaan Dinas Perkimtan Kabupaten Jeneponto** yang bersedia diwawancarai dan membantu penulis dalam menyebarkan kuesioner serta memberikan bantuan selama di lokasi penelitian;

10. Kepada Saudara/i **Andika Saputra Hasanuddin, Anggel Erpa Erong Pakiding, Briyan Yudha Octa Pratama, Yesimiel Pabubung, Aprilia Laxsmi Pareang, dan Muhammad Islam Darmawan**, yang telah bersedia membantu dalam segala hal, berdiskusi, memberi kritik dan masukan, serta menemani penulis di kesehariannya;

11. Kepada saudara/i seperjuangan dari kerja praktek dan KKN, **Rukni Rahayu, Musfiratul Muthmainnah, Ibrahim Jabir B, dan Muh Nur Imam** terima kasih karena selalu membantu, menemani, dan mau direpotkan selama proses kerja praktek sampai tahap skripsi;

12. Kepada sahabat-sahabatku **Qanitah Taufiqah Imran, Moh. Akhtar Setia Ramadhan Eka Diningrat, Nurul Izza Syamsu Alam, dan Reizaldy Mussara Mauli**, terima kasih atas do'a, dukungan, semangat, dan selalu menemani penulis sampai saat ini;

13. Kepada keluarga besar **PT. LANOILO PLAN CONSULTANT** yang selalu membantu, mengarahkan, dan memberikan kritik dan saran untuk penulis;

14. Kepada seluruh saudara-saudari seperjuangan **PWK 2018 (PEACE18)**, yang selalu memberikan dukungan, masukan dan arahan serta memberikan cerita yang sangat berharga dalam kehidupan penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2022

Ameliya Magfirah

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9

A. Permukiman 9

B. Isu Strategis Pengembangan Permukiman 12

C. Permukiman Kumuh 15

D. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 16

E. Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh 17

F. Konsep Penanganan Permukiman Kumuh 25

G. Penelitian Terdahulu..... 29

H. Kerangka Pikir 34

BAB III METODE PENELITIAN..... 35

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 37

C. Jenis dan Sumber Data 39

1. Jenis Data 39

2. Sumber Data	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Teknik Pengambilan Data.....	42
1. Observasi	43
2. Wawancara	43
3. Kuesioner	43
4. Studi Literatur	44
F. Teknik Analisis Data	44
G. Variabel Penelitian.....	47
H. Definisi Operasional	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto	54
1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi.....	54
2. Topografi dan Kelerengan.....	57
3. Jenis Tanah.....	61
4. Geologi.....	63
5. Hidrologi dan Sumberdaya Air	65
6. Klimatologi.....	68
7. Penggunaan Lahan	69
8. Kependudukan	72
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Binamu	73
1. Letak Geografis dan Administrasi	73
2. Topografi dan Kemiringan Lereng	76
3. Geologi dan Jenis Tanah	76
4. Hidrologi dan Sumberdaya Air	76
5. Kependudukan	75
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
1. Letak Geografis dan Administrasi	78
2. Profil dan Karakteristik Kawasan Penelitian	80
D. Analisis Penyebab Kekumuhan	91

E. Analisis Penentuan Arahana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh 98

BAB V PENUTUP.....

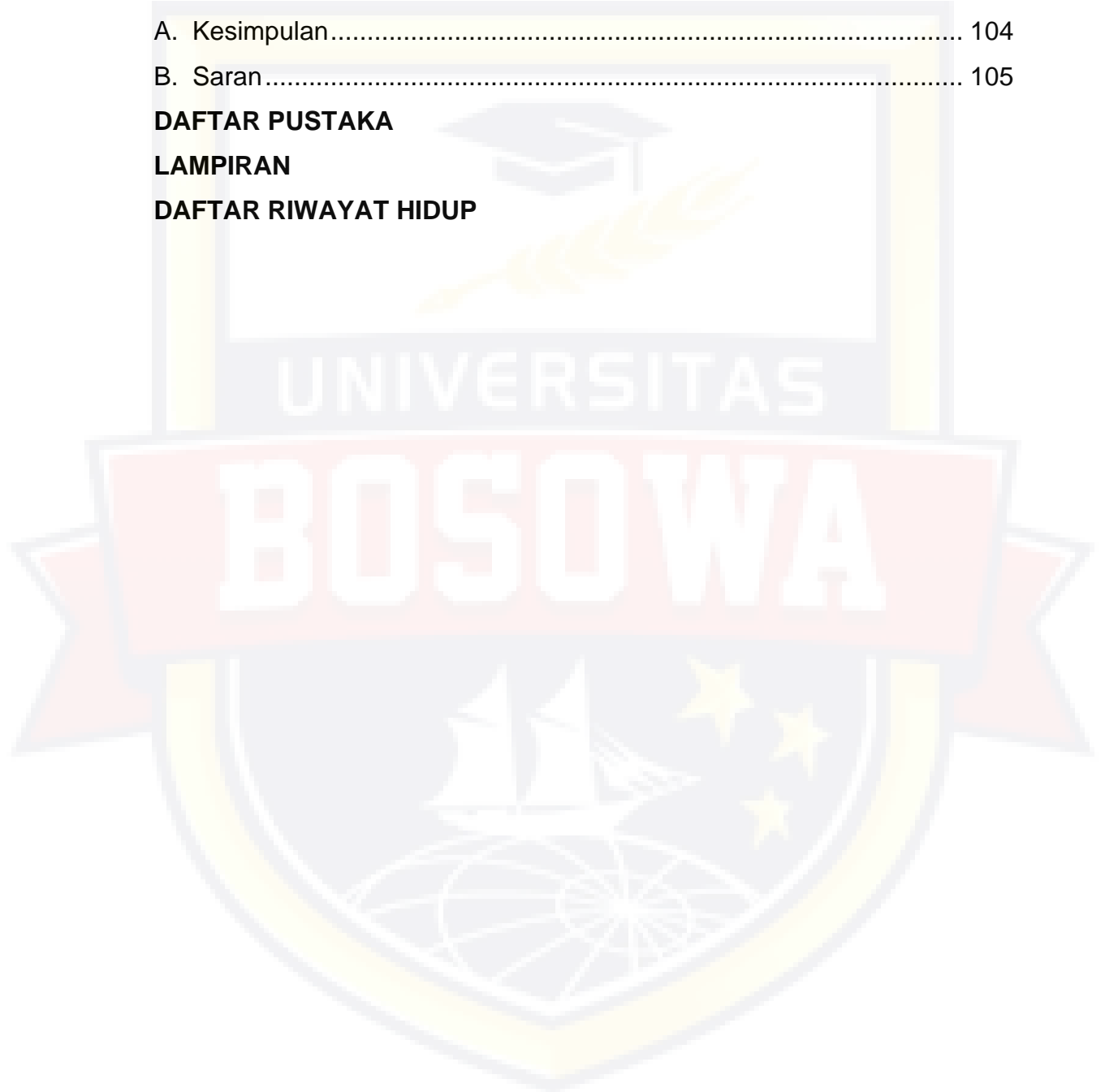
A. Kesimpulan..... 104

B. Saran..... 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penentuan <i>Stakeholders</i> dalam Penelitian	41
Tabel 3.2 Skala Prioritas Faktor Pembanding AHP	46
Tabel 3.3 Variabel, Indikator, dan Kebutuhan Data	49
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	55
Tabel 4.2 Topografi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	57
Tabel 4.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	58
Tabel 4.4 Jenis Tanah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	61
Tabel 4.5 Geologi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	64
Tabel 4.6 Curah Hujan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	69
Tabel 4.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2022	69
Tabel 4.8 Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	72
Tabel 4.9 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan/Desa di Kecamatan Binamu Tahun 2020	73
Tabel 4.10 Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kecamatan Binamu Tahun 2020	77
Tabel 4.11 Jumlah Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Migrasi Keluar Seumur Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jeneponto, 2015	80
Tabel 4.12 Penggunaan Lahan di Kawasan Biringjene	81
Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Menurut Lingkungan di Kelurahan Pabiringa, Tahun 2021	85
Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pabiringa, Tahun 2021	86
Tabel 4.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jeneponto, 2018-2020	86
Tabel 4.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Pabiringa, 2021	89

Tabel 4.17 Rekapitulasi Nilai Faktor Penyebab Kekumuhan.....	97
Tabel 4.18 Rekapitulasi Nilai Alternatif.....	98
Tabel 4.19 Perumusan Arahana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	38
Gambar 3.2 Struktur Hiearki AHP	45
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto.....	56
Gambar 4.2 Peta Topografi Kabupaten Jeneponto	59
Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jeneponto	60
Gambar 4.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jeneponto.....	62
Gambar 4.5 Peta Geologi Kabupaten Jeneponto.....	66
Gambar 4.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Jeneponto	67
Gambar 4.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto	71
Gambar 4.8 Peta Administrasi Kecamatan Binamu	75
Gambar 4.9 Peta Lokasi Penelitian	79
Gambar 4.10 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
Gambar 4.11 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan....	90
Gambar 4.12 Peta Simpangan RTRW dengan Guna Lahan.....	91
Gambar 4.13 Struktur Hierarki AHP dalam Penelitian.....	92
Gambar 4.14 Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Kriteria	93
Gambar 4.15 Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Sub Kriteria Sarana Prasarana	95
Gambar 4.16 Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Sub Kriteria Sosial Ekonomi.....	96
Gambar 4.17 Rekapitulasi Faktor Penyebab Kekumuhan.....	97
Gambar 4.18 Rekapitulasi Strategi Penanganan Kumuh	99
Gambar 4.19 Peta Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kota merupakan fungsi waktu yang merupakan proses perubahan keadaan dari satu waktu ke waktu yang lain (Yunus, 2000 dalam Suparno dkk., 2021). Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitasnya berdampak pada kebutuhan lahan untuk permukiman. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan pendanaan dan sistem pembiayaan, serta masyarakat terkoordinasi dan terpadu (UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, berkembang serta melangsungkan hidupnya (Budiharjo, 2009 dalam Suparno dkk., 2021). Pada hakikatnya, permukiman merupakan lingkungan dimana masyarakat mempengaruhi dan memanfaatkan lingkungan tersebut. Permukiman memiliki dua arti yang berbeda, yaitu isi yang menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat lingkungan sekitar, dan wadah yang menunjuk pada fisik hunian terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia (Sastra & Marlina, 2006 dalam Suparno dkk., 2021)

Sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini dapat dimaknai bahwa perumahan dan kawasan pemukiman yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara. Adapun syarat-syarat permukiman yang baik berdasarkan aspek prasarana dan sarana lingkungan sesuai dengan Kepmenkes No.829/Menkes/SK/VII/1999 meliputi parameter sebagai berikut:

1. Memiliki taman bermain untuk anak dan sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan
2. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit
3. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan yang tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat.
4. Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan

5. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan
6. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan
7. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya
8. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya.

Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang bermukim menyebabkan pembangunan rumah tipe moderen dan tempat-tempat untuk usaha oleh masyarakat sendiri terus bertambah. Pembangunan yang tidak disertai dengan pengaturan dan pengendalian yang baik menjadikan lingkungan menjadi kumuh, tidak teratur, tidak nyaman dan tidak sehat.

Isu permukiman kumuh adalah salah satu topik utama pembangunan perkotaan dan sangat kontroversial karena pekerjaan pengolahan yang sebenarnya terkait langsung dengan pengembangan lebih lanjut dari kawasan kumuh dan munculnya kawasan kumuh baru. Dampak permukiman kumuh, khususnya, menciptakan paradigma buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan dan menghadirkan citra negatif ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah untuk

mengatur pelayanan penting dan penghidupan warga. Di sisi lain, dari segi sosial budaya dan tatanan sosial, masyarakat yang tinggal di wilayah slam pada umumnya adalah kelompok ekonomi berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi penyebab berkurangnya disiplin dan ketidakteraturan dalam berbagai struktur sosial masyarakat.

Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten berkembang yang memiliki dinamika pembangunan yang dinamis. Arus perkembangan penduduk di Kabupaten Jeneponto tergolong relatif sedang. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang menyebar menjadi salah satu kendala dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto bahwa telah tercatat 42 desa/kelurahan yang termasuk wilayah kumuh dari 113 desa/kelurahan, salah satunya di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu.

Kecamatan Binamu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan luas 69,49 km² yang terdiri atas 13 desa/kelurahan yang merupakan ibukota Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Binamu pada tahun 2020 sebanyak 63.570 jiwa. Sebanyak 7.732 jiwa atau 1.933 kepala keluarga dari keseluruhan penduduk Kecamatan Binamu yang menetap di kawasan kumuh. Meningkatnya kebutuhan ruang di daerah perkotaan menyebabkan masyarakat tinggal dan membangun permukiman di daerah yang berdampingan dengan pusat kegiatan perkotaan. Hal ini sangat berbanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan permukiman.

Berbicara mengenai kualitas lingkungan permukiman, salah satu kawasan di Kecamatan Binamu yaitu Kawasan Biringjene merupakan daerah di kawasan pesisir yang nampaknya patut diperhatikan. Sebagian masyarakat hidup dengan kualitas lingkungan yang rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi lingkungan permukiman itu dapat dilihat pada rumah penduduk yang merupakan bangunan yang tidak permanen, jalan-jalan yang belum diaspal, sulitnya air bersih dan saluran air yang tidak teratur, pembuangan kotoran sembarangan serta perilaku warga yang tidak mempertimbangkan kebersihan maupun kesehatan dengan membuang air limbah rumah tangga di sungai yang mengakibatkan sampah menumpuk dan bau tidak sedap tak terbendung

lagi. Seperti yang diketahui, Kecamatan Binamu merupakan ibu kota kabupaten di Kabupaten Jeneponto. Hal ini sebanding dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga tidak heran jika Kawasan Biringjene memiliki kondisi permukiman yang dapat di kategorikan kumuh sesuai dengan parameter yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlunya untuk mengkaji faktor apa yang menjadi penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
2. Untuk merumuskan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bidang Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi permukiman menjadi permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mampu mengembangkan dan meneruskan penelitian ini sehingga *output* dari penelitian ini dapat lebih maksimal.

2. Pemerintah dan *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai upaya pengendalian dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang tinjauan terhadap literatur dan landasan teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang digunakan sebagai dasar pemahaman penulis guna mencapai tujuan penelitian

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan tentang metode dalam melakukan penelitian berupa waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN memuat gambaran umum wilayah studi, hasil analisis serta pembahasan penelitian

BAB V PENUTUP memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERMUKIMAN

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Sedangkan kawasan permukiman didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Menurut Finch (Rindarjono, 2017) *Settlement* atau permukiman merupakan himpunan satuan kediaman yang dihuni oleh manusia dan mencakup bangunan rumah, jalur jalan dan fasilitas lainnya sebagai komponen utama yang digunakan sebagai alat pelayanan manusia tersebut. Sedangkan menurut Yunus (Rindarjono, 2017) Permukiman adalah suatu bentuk *artificial* maupun *natural* dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.

Secara teoritis, Dexoadis (Surya, 2018) menyebutkan bahwa permukiman adalah hasil interaksi antara manusia dan lingkungannya yang bersifat dinamis. Permukiman selalu berkembang dari waktu ke waktu, baik secara natural maupun dengan intervensi dari luar. Perspektif ini menegaskan bahwa perkembangan permukiman dipengaruhi oleh 5 (lima) elemen penting dalam proses pembentuknya, yaitu *nature, man, society, shells, and network*.

Nature merupakan lingkungan alamiah yang menjadi wabah bagi manusia (*man*) untuk beraktivitas. Manusia sebagai makhluk sosial pada akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok dalam rangka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Kelompok-kelompok ini kemudian mengembangkan norma dan relasi internal yang dikenali dengan masyarakat (*society*). Perkembangan fisik lingkungan alamiah tidaklah cukup untuk menyediakan perlindungan terhadap aktivitas manusia. Masyarakat kemudian mengubah sebagian lingkungan alamiah untuk menjadi hunian (*shell*). Perkembangan *shell* yang semakin kompleks kemudian harus dilengkapi dengan elemen penunjang aktivitas yang menghubungkan hunian-hunian dalam satu sistem lingkungan. Jaringan penghubung antar *shell* ini kemudian dikenal dengan *network*. Jaringan ini merupakan prasarana, utilitas

umum yang juga disebutkan dalam definisi permukiman (UU No. 11 Tahun 2011).

Berdasarkan skala ruang lingkupnya, Yunus (Muta'ali & Nugroho, 2016) permukiman ditinjau dari segi bahasan dan wilayahnya yaitu makro, meso dan mikro. Skala ruang lingkup permukiman secara makro meliputi sistem kota-kota maupun sistem desa-desa dalam wilayah sangat luas. Dalam skala permukiman meso, analisisnya ditunjukkan pada permukiman perdesaan maupun perkotaan secara individual yang digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Studi permukiman secara mikro cakupannya lebih sempit lagi dan sorotan utama ditunjukkan pada salah satu komponen dalam skala meso yaitu *housing*.

Menurut Doxiadis (Surtiani, 2006), pertumbuhan permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. *Growth of Density* (Pertambahan Penduduk)

Pertambahan jumlah penduduk yaitu kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

2. *Urbanization* (Urbanisasi)

Urbanisasi yaitu adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kelompok urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

B. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan (Akhsa, 2017).

Dalam perencanaan pembangunan permukiman harus memperhatikan isu-isu strategis. Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Hal ini merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun isu strategis pengembangan permukiman yaitu sebagai berikut.

1. Tingginya harga barang pokok berimbas pada tingginya harga barang lain dan sangat berpengaruh pada sektor real (konstruksi) sehingga berdampak pada mahalnya harga bahan bangunan yang secara langsung akan mempengaruhi harga dari untuk pembangunan rumah itu sendiri;
2. Peruntukan tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi kondisi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah karena pelanggaran terhadap RTRW;
3. Laju urbanisasi di daerah tumbuh cepat dan harus direspon secara positif agar pertumbuhan lebih merata;
4. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam dengan munculnya kantong daerah kumuh;
5. Lambatnya respon pemerintah setempat dalam percepatan pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman yang baik;

6. Kebutuhan akan perumahan baru yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat. Sementara dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri (Perkim, 2021);
7. Pemanfaatan lahan perkotaan makin mempersulit warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, karena kenaikan harga tanah menjadi pendongkrak utama kenaikan harga rumah yang naik rata-rata 20% per tahun (Perkim, 2021);
8. Saat ini Indonesia sudah mendekati krisis perumahan, karena jumlah *backlog* perumahan sudah mencapai 15 juta dengan tambahan satu juta pertahun (Perkim, 2021).

Kurangnya perencanaan kota dan kebijakan Permukiman telah menyebabkan penciptaan permukiman kumuh di daerah perkotaan (Uddin, 2018). Kawasan kumuh tersebut menyebabkan batasan ruang huni yang ditempati masyarakat Indonesia masih kurang memadai, kurang nyaman dan berdampak buruk pada lingkungan permukimannya. Permukiman kumuh pada dasarnya memiliki kondisi perumahan yang dibawah standar dengan kepadatan tinggi dan tidak sehat. Permukiman kumuh ini dapat ditangani melalui penyadaran masyarakat melalui program pemerintah, LSM, dan sektor swasta (Uddin, 2018).

C. PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh menurut Drakakakis dan Grimes (Muta'ali & Nugroho, 2016) adalah kompleks permukaan yang secara fisik daerah kumuh, ditandai oleh bentuk rumah yang kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola *settlement* yang tidak teratur, kualitas lingkungan yang rendah, serta minimnya fasilitas umum.

Menurut Yudohusodo (1991), permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur dan tidak berpola misalnya letak rumah dan jalan yang tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan MCK yang bentuk fisiknya tidak layak.

Menurut Khomarudin (Surtiani, 2006) lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha)
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah
3. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar

4. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan
5. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku.

Definisi kawasan permukiman kumuh adalah kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim (Krisandriyana dkk., 2019). Ciri-ciri kawasan permukiman kumuh menurut Parsudi Suparlan (Krisandriyana dkk., 2019) yaitu dihuni oleh penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal, serta dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

D. TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari:

1. Permukiman Kumuh di Atas Air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.

2. Permukiman Kumuh di Tepi Air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

3. Permukiman Kumuh di Dataran Rendah

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

4. Permukiman Kumuh di Perbukitan

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng >10% dan <40%

5. Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana

Permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

E. FAKTOR PENYEBAB TUMBUHNYA PERMUKIMAN KUMUH

Keberadaan permukiman kumuh disebabkan oleh adanya pengaruh pertambahan kepadatan penduduk akibat dari urbanisasi, kemiskinan, kebudayaan, dan aktivitas politik (Clinord, 1978 dalam Rindarjono, 2016).

Berkembangnya permukiman kumuh di perkotaan juga disebabkan oleh 2 (dua) faktor (Astuti, 2004) yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan krisis ekonomi, dapat menjadi pendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki, ditambah dengan persaingan di perkotaan yang ketat, maka pendatang tersebut hanya dapat membangun dan menempati rumah dengan kondisi yang sangat minim di perkotaan. Selain itu, jumlah pendatang yang banyak menyebabkan pemerintah tidak dapat menyediakan hunian yang layak bagi mereka;

2. Faktor Bencana

Bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, longsor, ataupun bencana akibat perang dan pertikaian dapat menjadi salah satu pendorong perluasan permukiman kumuh.

Menurut Sadyohutomo (2008), permukiman kumuh terbentuk dikarenakan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup
2. Ketidaktanggapan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Hal tersebut menyebabkan perilaku masyarakat yang secara swadaya membangun permukiman tanpa didasari dengan perencanaan tapak yang memadai dan akhirnya bentuk

serta tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman.

Sementara itu, menurut Suud & Navitas (2015) yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Kepadatan penduduk yang tinggi
3. Kondisi pelayanan air bersih yang belum merata dalam menjangkau masyarakat
4. Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak layak
5. Kondisi fasilitas persampahan yang buruk
6. Kondisi jalan yang buruk baik dari segi perkerasan maupun lebar jalan
7. Keterbatasan ruang terbuka
8. Jenis pekerjaan informal dengan pendapatan rendah
9. Tingkat pendidikan yang rendah
10. Keterbatasan lahan permukiman

Menurut Hariyanto (2010), faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung.

1. Faktor yang Bersifat Langsung

Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan

dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB). Faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus (MCK), pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan.

Kondisi lingkungan perumahan yang menyebabkan timbulnya kekumuhan adalah keadaan rumah yang mencerminkan nilai kesehatan yang rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, koefisien dasar bangunan (KDB) yang tinggi, serta status lahan yang tidak jelas (keberadaan rumah di daerah marjinal) seperti rumah yang berada di bantaran sungai, rel kereta api, dll. Rumah-rumah yang berada di daerah marjinal berpotensi terkena banjir pada saat musim hujan, sehingga nilai kekumuhan tertinggi terjadi pada saat musim penghujan.

Sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menyebabkan kekumuhan seperti kurangnya sarana air bersih yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan air dari sumber yang tidak bersih sehingga berpotensi menimbulkan penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak sehat, rendahnya penggunaan MCK serta banyaknya masyarakat yang membuang hajat secara tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran organik dan

peningkatan bakteri *e-coli*, yang akan menimbulkan dampak lanjutan berupa gangguan kesehatan masyarakat.

Belum adanya pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu unsur penentu timbulnya kekumuhan. Akibat tidak adanya sistem pengelolaan sampah dan kurangnya sarana pembuangan sampah mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di pekarangan. Tidak berfungsinya sistem jaringan drainase juga merupakan salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh. Kondisi ini menimbulkan tambahan problematika lingkungan antara lain terjadinya banjir (genangan) akibat penyumbatan sungai dan saluran air (drainase).

Faktor terakhir yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap timbulnya lingkungan kumuh adalah pembuangan limbah rumah tangga dan kondisi jaringan jalan. Rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah rumah tangga dan jaringan jalan juga menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh.

2. Faktor yang Bersifat Tidak Langsung

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung

terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat.

Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kekumuhan yaitu taraf ekonomi masyarakat (pendapatan masyarakat), pekerjaan masyarakat. Penghasilan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki dana untuk membuat kondisi rumah yang sehat, pengadaan MCK, tempat sampah dan lain-lain yang terkait dengan sarana lingkungan rumah yang sehat. Penghasilan yang rendah juga mengakibatkan sebagian masyarakat membangun rumah tidak permanen di bantaran sungai, rel kereta api, dll. Dengan demikian taraf ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan. Demikian juga halnya dengan pekerjaan masyarakat. Pekerjaan masyarakat yang kurang layak menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga kemampuan untuk membuat rumah yang layak huni dan sehatpun menjadi rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh tidak langsung terhadap kekumuhan adalah kondisi sosial kependudukan yang meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Jumlah anggota keluarga yang besar dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang

akhirnya mendorong kesadaran yang rendah terhadap upaya menciptakan lingkungan dan kehidupan yang sehat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas membuang hajat dan sampah yang berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan dirinya.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh yaitu faktor budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Selain faktor sosial seperti tingkat pendidikan, faktor kebiasaan juga menjadi pendorong munculnya kawasan kumuh. Faktor kebiasaan ini juga yang menyebabkan masyarakat merasa lebih nyaman membuang hajat di saluran air dan kebun sekalipun tidak sehat, dibanding membuang hajat di WC umum. Untuk itu beberapa WC umum yang dibangun oleh pemerintah berada dalam kondisi terlantar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu faktor adat istiadat seperti “makan tidak makan yang penting kumpul” juga merupakan salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh, walaupun bersifat tidak langsung. Namun adat istiadat seperti ini mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dalam suatu lingkungan perumahan walaupun tidak layak huni.

Sedangkan Rindarjono (2017) menjelaskan bahwa penyebab pertumbuhan permukiman kumuh di daerah perkotaan dipengaruhi faktor sebagai berikut:

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi terjadi karena adanya daya tarik daerah perkotaan maupun karena keadaan daerah pedesaan yang masih tertinggal. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan terjadinya tekanan ekonomi sehingga masyarakat tersebut terpaksa tinggal di daerah pinggiran dan bertumbuhnya lingkungan permukiman kumuh.

2. Faktor Lahan Perkotaan

Pertumbuhan penduduk yang terjadi tentunya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan permukiman, hal ini menjadi masalah pada daerah perkotaan. Ketidakseimbangan antara penyediaan perumahan yang terjangkau bagi golongan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah di daerah perkotaan menjadi permasalahan ketersediaan lahan permukiman

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dasar permukiman dibutuhkan untuk menunjang kehidupan apabila tidak memenuhi standar dapat mengakibatkan kekumuhan.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan daya beli akan perumahan yang layak.

5. Faktor Tata Ruang

Permukiman kumuh tidak dapat dipisahkan dari struktur ruang kota, sehingga perencanaan tata ruang kota sangat penting untuk memperhatikan daya dukung lingkungannya dimana permukiman kumuh memiliki daya dukung yang relatif rendah. Jika pembangunan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang kota akan berdampak pada rusaknya lingkungan dan berpotensi pertumbuhan permukiman kumuh dan permukiman kumuh baru.

F. KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Adapun konsep penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh mencakup:

- a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan Pengendalian

Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Pemberdayaan Masyarakat

Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi permukiman kumuh dengan pola penanganan sebagai berikut;

a. Pemugaran

Pemugaran merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni;

b. Peremajaan

Merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak.

Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya;

c. Permukiman Kembali

Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTR atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/lokasi

tersebut. Permukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang juga menetapkan lokasi untuk permukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat.



G. PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul Penelitian, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan	Wilayah Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar (St. Nurhalizah Mardjuni, 2020)	Untuk mengidentifikasi penyebab permukiman kumuh dan mengetahui strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar	Kelurahan Tallo, Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase 2. Air Minum 3. Air Limbah 4. Persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>Chi-Square</i> 2. Analisis SWOT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil analisis <i>chi-square</i> menunjukkan bahwa sumber air minum dan kebutuhan air minum berpengaruh kuat dalam penyebab kekumuhan, sedangkan air limbah dan persampahan berpengaruh sedang dalam penyebab kekumuhan 2. Adapun strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar ialah memanfaatkan masyarakat yang mendukung program pemerintah terkait kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukimannya dengan adanya SK MENTRI NO 534/KTPS/M/200 Tentang penataan permukiman, memanfaatkan kesadaran

No	Judul Penelitian, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan	Wilayah Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						masyarakat dalam meningkatkan kualitas Permukiman Kumuh sesuai dengan Permen PU NO 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, merawat jaringan jalan yang sudah ada seperti pada RTRW Kota Makassar serta meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat sekitar dengan program pemberdayaan masyarakat
2.	Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran Dengan Pendekatan <i>Eco-Settlements</i> (Bayu Arifianto Muhammad 2016)	Mengidentifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas permukiman kumuh dengan indikator <i>eco</i>	Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepadatan penduduk 2. Urbanisasi 3. Tingkat kemiskinan 4. Tingkat Pendidikan 5. Pelayanan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Statistik Deskriptif Kualitatif 2. Analisis <i>Delphi</i> 3. Analisis Deskriptif Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik wilayah permukiman kumuh Kecamatan Kenjeran diidentifikasi melalui Analisa deskriptif dimana hasilnya masuk dalam jenis permukiman ringan dan permukiman kumuh sedang. 2. Ditemukan faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh diidentifikasi dengan Analisa delphi kepada 8

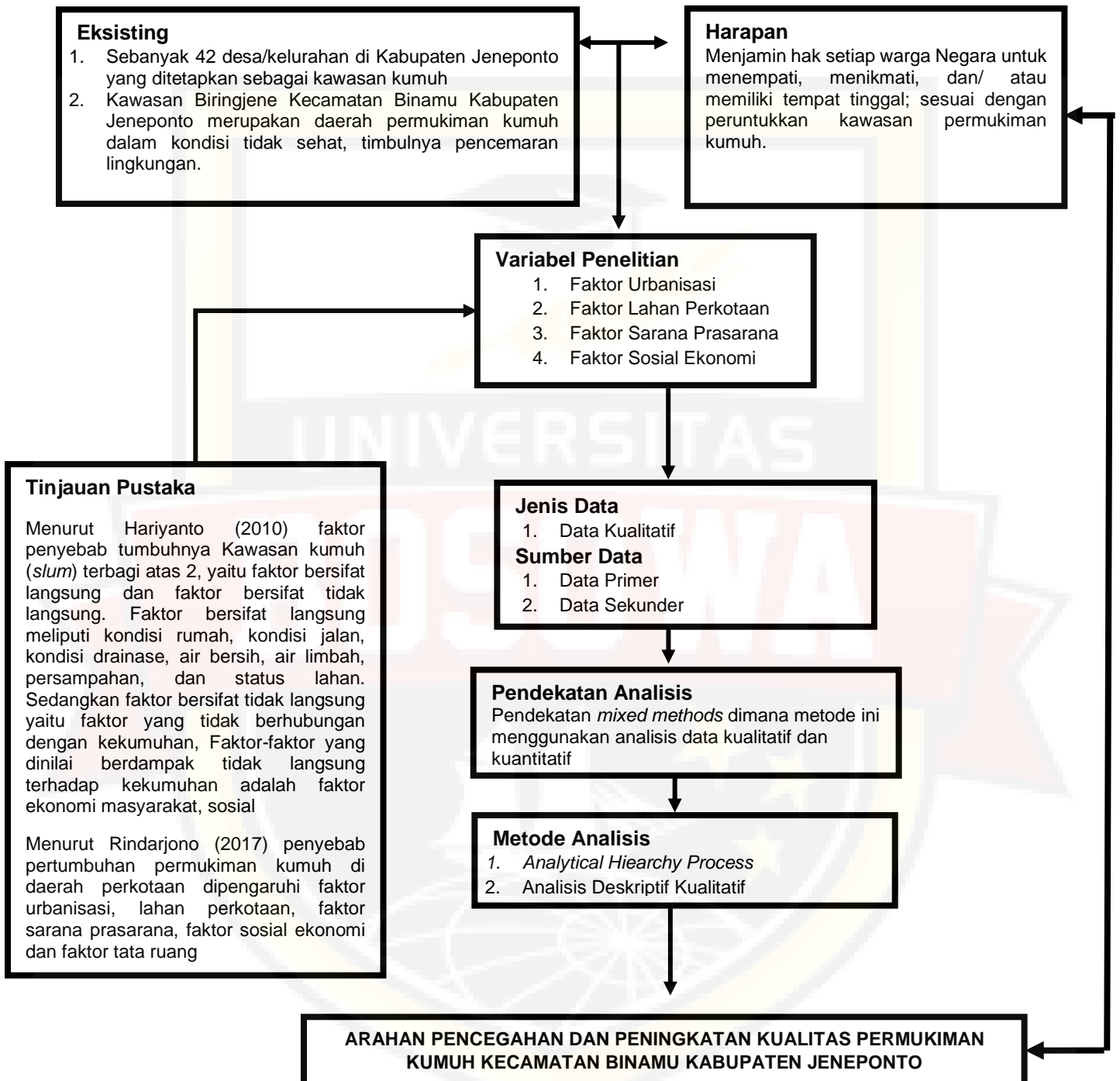
No	Judul Penelitian, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan	Wilayah Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p><i>settlements</i>, dan Merumuskan arahan penataan permukiman kumuh di wilayah Kecamatan Kenjeran dengan pendekatan <i>eco settlements</i>.</p>		<p>6. Mata pencaharian 7. Tingkat pendapatan 8. Fisik bangunan 9. Kebencanaan</p>		<p>stakeholder. Faktor tersebut adalah sebagai berikut aspek lingkungan (air bersih, drainase, Sanitasi, sampah, aksesibilitas, rumah sehat, dan RTH). Karakteristik ekonomi (Jenis pekerjaan, tingkat pendapatan). Sosial (Kepadatan penduduk, urbanisasi, budaya masyarakat, Pemberdayaan masyarakat). Kelembagaan</p>
3.	<p>Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat Di Kelurahan Ciketingudik Dan Sumurbatu Kota Bekasi (Anindita Wilandari, 2017)</p>	<p>1. Menganalisis variabel penyebab kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu 2. Menganalisis prioritas variabel penyebab kekumuhan</p>	<p>Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu, Kota Bekasi</p>	<p>1. Peran Pemerintah 2. Ekonomi 3. Kependudukan 4. Infrastruktur permukiman 5. Bahaya 6. Standar pemanfaatan ruang sekitar TPA</p>	<p>1. Analisis <i>Delphi</i> 2. <i>Analytical Hierarchy Process</i> 3. Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Variabel yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi beserta prioritas peningkatannya secara berturut-turut adalah sebagai berikut : (1) infrastruktur permukiman (jaringan air bersih, persampahan, saluran drainase, jaringan jalan), (2) Peran pemerintah (kemampuan pemerintah menyediakan hunian</p>

No	Judul Penelitian, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan	Wilayah Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>untuk peningkatan kualitas lingkungan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu</p> <p>3. Menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu</p>				<p>layak), (3) Standard pemanfaatn ruang sekitar TPA (jarak terhadap permukiman, bau, jarak terhadap badan air), (4) Ekonomi (tingkat pendapatan, jenis pekerjaan), (5) Kependudukan (kesadaran dan kepedulian, tingkat pendidikan), (6) Bahaya kebakaran.</p> <p>2. Prioritas tertinggi adalah peningkatan kualitas jaringan air bersih dikarenakan kondisinya yang telah mengalami pencemaran oleh air lindih TPST. Arahan yang diusulkan terkait isu tersebut adalah penutupan sumur bor yang tercemar di RW 01 Sumurbatu RT 01 – 07, revitalisasi sumur artesis yang telah tidak berfungsi di RT 01/03 dan 02/04 Sumurbatu, serta engadaan HIPPAM di RW 04</p>

No	Judul Penelitian, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan	Wilayah Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>Ciketingudik, RW 01, 03 (RT 02 dan 05), 04 Sumurbatu.</p> <p>3. Beberapa arahan lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah studi adalah (a) penyediaan fasilitas dan sistem persampahan, penerangan jalan umum, green barrier, sumur uji, dan IPAL terpadu (b) perbaikan perkerasan jalan, (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (d) peningkatan peran pemerintah dalam menyediakan hunian layak huni bagi warga.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

H. KERANGKA PIKIR



Gambar 3.2 Kerangka Pikir
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Cresswell, 2010). Sedangkan menurut Sugiyono (2016) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Pendekatan *mix methods* untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam Bab 1 melalui metode kualitatif dan kuantitatif, hal ini dilakukan untuk menemukan masalah di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru untuk pemecahan masalah.

Penelitian ini menggunakan teknik campuran bertahap. Menurut Cresswell (2010), Strategi ini adalah salah satu di mana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dalam satu metode dengan yang lain. Strategi ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan wawancara untuk memperoleh data kualitatif dan kemudian data

kuantitatif, dalam hal ini menggunakan survei. Strategi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu;


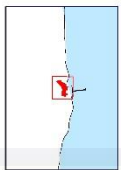
1. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis yang dibangun berdasarkan hasil awal kualitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.
2. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan data kuantitatif dan menganalisisnya pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.
3. Strategi transformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya.

Seperti disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial, (*sequential mixed methods*) terutama

strategi eskplanatoris sekuensial. Jadi, tahap pertama melakukan wawancara kemudian menganalisis data kualitatif.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Biringjene, Lingkungan Tanrusampe Barat dan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu kawasan dengan klasifikasi kumuh sedang berdasarkan SK Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini terhitung dari bulan Maret tahun 2022 hingga Agustus tahun 2022.

 <p>PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA 2022</p>	
<p>PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO</p>	
<p>ARAHAN PENGECAMAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN RUMAH KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO</p>	
<p>0 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 Km</p> <p>SKALA 1:250.000 SKALA 1:125.000</p>	
<p>Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan</p> <p>Provinsi Sulawesi Grafik Geografi dan Informasi Transverse Mezzano Dinamika Horisontal WGS 1984 - Zone 31S</p>	
<p>DIAGRAM LOKASI</p> 	
<p>Keterangan</p> <p>□ Wilayah Penelitian</p> <p>--- LOKASI PENELITIAN</p>	
<p>DOSEN :</p> <p>Dr. Ir. Syafri, M.Si Ruseni Ruslan, S.T., M.Si</p>	
<p>MAHASISWA :</p> <p>AMELIA MAGTRAH 451865209</p>	
<p>SUMBER PETA</p> <p>- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 Lektor Utama 2017 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Lektor Utama 2017 - BPS/Statistik Kota Tahun 2019</p>	



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2016). Data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini meliputi seluruh variabel penelitian

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut;

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung/survey (Sugiyono, 2016). Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi;
 - a. Ketidakteraturan Bangunan dan Konstruksi Bangunan
 - b. Aspek Jalan
 - c. Aspek Drainase

- d. Aspek Sanitasi
- e. Aspek Persampahan
- f. Aspek Air Bersih

- g. Aspek Proteksi Kebakaran

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002), data yang diperoleh pada instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan instansi lainnya.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah dari pihak pemerintah (*governance*), akademisi, dan masyarakat (*civil society*).

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proposive sampling* dengan teknik *stakeholder analysis*. Pemangku kepentingan atau disebut juga dengan *stakeholder* merupakan pihak yang dapat mempengaruhi maupun menerima dampak dari keputusan yang diambil

(Freeman & McVea, 2001). Lansiluoto et al. (Maddock., 2018) menyatakan bahwa *stakeholders* dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu *stakeholder* utama (*primary stakeholders*) dan *stakeholder* lainnya atau pendukung (*secondary stakeholders*). Salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pemetaan *stakeholder* (*stakeholder mapping*). Untuk memetakan *stakeholder*, terdapat 4 (empat) tahapan yang perlu dilakukan (Business for Social Responsibility, 2011). Tahap pertama yaitu mengidentifikasi (*identifying*) atau membuat daftar pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti organisasi dan individu. Selanjutnya, daftar *stakeholder* tersebut dianalisis (*analyzing*) lebih lanjut untuk memahami relevansinya, memahami hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder*, dan memberikan prioritas berdasarkan kepentingan *stakeholder*. Adapun hasil analisis *stakeholder* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Penentuan *Stakeholders* dalam Penelitian

No	Komponen	<i>Stakeholders</i>	Kepentingan	Peran <i>Stakeholders</i>
1	Pemerintah	Bappeda Kabupaten Jeneponto	Memiliki kepentingan untuk menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<i>Stakeholder</i> Utama
2		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Memiliki kepentingan menjadi <i>leader</i> untuk melaksanakan	<i>Stakeholder</i> Utama

No	Komponen	Stakeholders	Kepentingan	Peran Stakeholders
		Ruang Kabupaten Jeneponto	penataan ruang di wilayah Kabupaten Jeneponto yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian	
3		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto	Memiliki kepentingan untuk melaksanakan urusan bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang perumahan dan permukiman serta bidang pengawasan dan pengendalian	<i>Stakeholder Utama</i>
4		Lurah Kelurahan Pabiringa	Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum permukiman di wilayah Kelurahan	<i>Stakeholder Utama</i>
5	Akademisi	Dosen PWK Universitas Bosowa	Memiliki kepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan tentang perumahan dan permukiman terhadap permasalahan permukiman kumuh	<i>Stakeholder Pendukung</i>
6	Masyarakat	Ketua Lingkungan	Mewakili kelompok masyarakat yang menghuni dan mengetahui kondisi permukiman	<i>Stakeholder Utama</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2022

E. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Teknik pengambilan data merupakan sebuah bentuk langkah langkah yang di lakukan dengan tujuan pemenuhan akan data yang telah di tetapkan dalam rangka pemenuhan jawabah akan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, Adapun teknik pengambilan data yang di lakukan ialah sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi di lapangan merupakan teknik pengamatan dalam melakukan pengamatan untuk mengetahui, memahami dan mencatat apa yang ada di lokasi tempat melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk melihat kriteria permukiman kumuh, seperti kondisi bangunan gedung, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi sanitasi, kondisi persampahan, kondisi air bersih, dan kondisi proteksi kebakaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

3. Kuesioner

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2016). Kuesioner (Daftar Pertanyaan) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyusun pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia.

4. Studi Literatur

Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur seperti buku, jurnal, internet, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian sehingga penulis memiliki gambaran dalam pelaksanaan penelitian.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

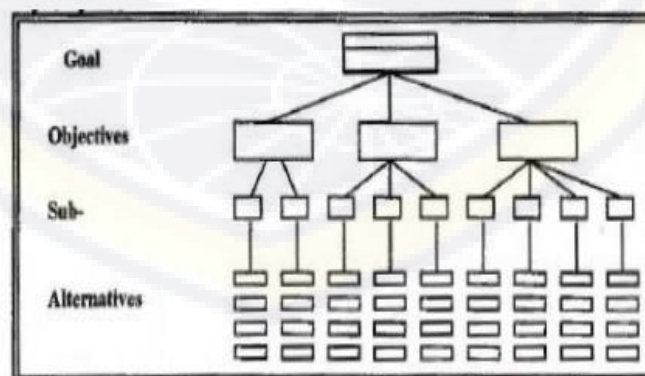
1. *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

AHP merupakan salah satu teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang komprehensif karena sifatnya yang multi atribut untuk menangani masalah yang kompleks baik aspek kualitatif dan kuantitatif. AHP (*Analytical Hierarchy Process*) merupakan suatu metode dalam sistem pengambilan keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat. Analisis dilakukan dengan memberi nilai prioritas dari tiap-tiap variabel, kemudian melakukan perbandingan berpasangan dari variabel-variabel tersebut dan alternatif-alternatif yang ada (Saaty, 1987).

AHP memiliki prinsip untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur serta menatanya dalam hirarki-hirarki. Tingkat kepentingan tiap-tiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dibandingkan dengan variabel lainnya. Selanjutnya dilakukan sintesa untuk menentukan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Adapun langkah-langkah dalam metode AHP (Saaty, 1987) yaitu sebagai berikut.

a. Menyusun hierarki permasalahan

Penyusunan hierarki ini berdasarkan jenis keputusan yang diambil. Pada tingkat puncak, hirarki hanya terdiri dari satu elemen yang disebut tujuan, yaitu sasaran keseluruhan yang bersifat luas. Tingkat selanjutnya dapat terdiri dari beberapa elemen yang dibagi dalam kelompok homogen, agar dapat dibandingkan dengan elemen-elemen tingkat sebelumnya. Adapun struktur hierarki seperti pada gambar berikut.



Gambar 3. 2 Struktur Hierarki AHP

Sumber: Saaty, 1987

b. Penilaian kriteria alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan.

Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat (Saaty, 1987). Nilai dan definisi pendapat kualitatif dalam skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2 Skala Prioritas Faktor Pembanding dalam AHP

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen di banding elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian saling kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lain
7	Satu elemen jelas lebih penting mutlak dari elemen lain	Satu elemen yang kuat didukung dan dominan terhadap praktek
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lain	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memenuhi tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan

Sumber: Saaty, 1987

c. Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. Dalam penelitian ini akan digunakan *software Expert Choice* dalam melakukan tahap ini.

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016) Sumber informasi dalam analisis ini terdiri dari gambaran umum atau fakta empirik dari variabel penyebab kekumuhan, dan kebijakan terkait sehingga menghasilkan arahan

G. VARIABEL PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun variabel dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Hariyanto (2010) dan Rindarjono (2017) sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 3.3 Variabel, Indikator, dan Kebutuhan Data

No	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Referensi	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Teknik Sampel	Teknik Analisis
1	Faktor apa yang menjadi penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto?	Penyebab kekumuhan	Faktor Urbanisasi	Migrasi penduduk	Hariyanto (2010) dan Rindarjono (2017)	Data Primer	Observasi Lapangan, Wawancara, dan Kuesioner	<i>Proposive Sampling</i>	<i>Analytical Hierarchy Process</i>
			Faktor Lahan Perkotaan	Penggunaan Lahan					
		Faktor Sarana Prasarana	Kondisi Bangunan						
			Kondisi Jalan						
			Kondisi Drainase						
			Kondisi Air Bersih						
			Kondisi Persampahan						
			Kondisi Air Limbah						
			Kondisi Proteksi Kebakaran						
		Faktor Sosial Ekonomi	Jumlah Penduduk						

No	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Referensi	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Teknik Sampel	Teknik Analisis
				Tingkat Pendidikan					
				Tingkat Kesehatan					
				Pendapatan Masyarakat					
				Jenis Pekerjaan					
			Faktor Tata Ruang	Simpangan Pola Ruang RTRW dan Penggunaan Lahan					
2	Bagaimana arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto?	Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Pencegahan	Pengawasan dan Pengendalian	Permen PUPR No.14 Tahun 2018	Data sekunder	Studi Literatur		Analisis Deskriptif Kualitatif
				Pemberdayaan Masyarakat					
			Peningkatan Kualitas	Pemugaran					
				Peremajaan					
				Pemukiman Kembali					

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
2. Faktor urbanisasi yaitu faktor migrasi dari luar kota menuju pusat kota;
3. Faktor lahan perkotaan dalam hal ini adalah penggunaan lahan;
4. Faktor sarana dan prasarana dalam hal ini merupakan 7 indikator kumuh yaitu Sarana prasarana terdiri dari 7 indikator kumuh yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi air bersih, kondisi drainase, kondisi air limbah, kondisi persampahan, kondisi proteksi kebakaran;
5. Faktor sosial ekonomi dalam penelitian ini terdiri atas jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, pendapatan penduduk, dan jenis pekerjaan;
6. Faktor tata ruang yang dimaksud yaitu struktur ruang kota;
7. Indikator kondisi bangunan ditinjau dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis;

8. Indikator kondisi jalan ditinjau dari jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan permukiman dan kualitas permukaan jalan yang buruk;
9. Indikator kondisi drainase ditinjau dari drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, ketersediaan drainase dan kualitas drainase yang buruk;
10. Indikator kondisi air bersih ditinjau dari ketidakterediaan akses air bersih dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih setiap orang;
11. Indikator kondisi air limbah ditinjau dari sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis;
12. Indikator kondisi persampahan ditinjau dari prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
13. Indikator kondisi proteksi kebakaran terdiri atas ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
14. Indikator jumlah penduduk yaitu jumlah manusia yang bermukim pada suatu lingkungan;
15. Indikator tingkat pendidikan yaitu rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh masyarakat;
16. Indikator tingkat kesehatan yaitu rata-rata angka kesehatan lingkungan masyarakat

17. Indikator pendapatan masyarakat yaitu rata-rata angka pendapatan masyarakat;

18. Indikator jenis pekerjaan yaitu rata-rata jenis pekerjaan masyarakat.

19. Nilai 1 yaitu kedua elemen sangat penting

20. Nilai 3 yaitu elemen yang satu agak lebih penting dibanding elemen yang kedua

21. Nilai 5 elemen yang satu lebih penting dibanding elemen yang kedua

22. Nilai 7 yaitu elemen yang satu sangat lebih penting dibanding elemen yang kedua

23. Nilai 9 elemen yang satu mutlak lebih penting dibanding elemen yang kedua

24. Nilai 2,4,6,8 nilai-nilai antara diantara dua nilai yang berdekatan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak pada $5^{\circ} 23'12''$ - $5^{\circ} 42'1,2''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 29' 12''$ - $119^{\circ} 56' 44,9''$ Bujur Timur (BT), dengan posisi geografis seperti itu maka letak kabupaten yang pusat pemerintahannya (Kota Bontosunggu) berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan), tepat berada di Selatan jazirah Pulau Sulawesi.

Secara administratif batas-batas Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah $749,79 \text{ km}^2$ atau $\pm 1,64\%$ dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni $152,69$

km² atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km² atau 3,99% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Bangkala	Allu	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	Bulujaya	152,96	20,40
3	Tamalatea	Tanetea	57,58	7,68
4	Bontoramba	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	Bontosunggu	69,49	9,27
6	Turatea	Paitana	53,76	7,17
7	Batang	Togo-Togo	33,04	4,41
8	Arungkeke	Taman Roya	29,91	3,99
9	Tarawang	Tarawang	40,68	5,43
10	Kelara	Tolo	43,95	5,86
11	Rumbia	Rumbia	58,30	7,78
Total			749,79	100,00

Sumber: Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2022

**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN JENEPONTO

**ARAHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO**

0 1,75 3,5 7 10,5 14

SKALA 1:250.000

Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Jeneponto
Distrik Bontomatene

Transverse Mercator
Datum: Everest
Units: Meter
WGS 1984 Zone 51E

DIAGRAM LOKASI

Keterangan

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Administrasi Kecamatan

PERAIRAN

- Laut

KECAMATAN

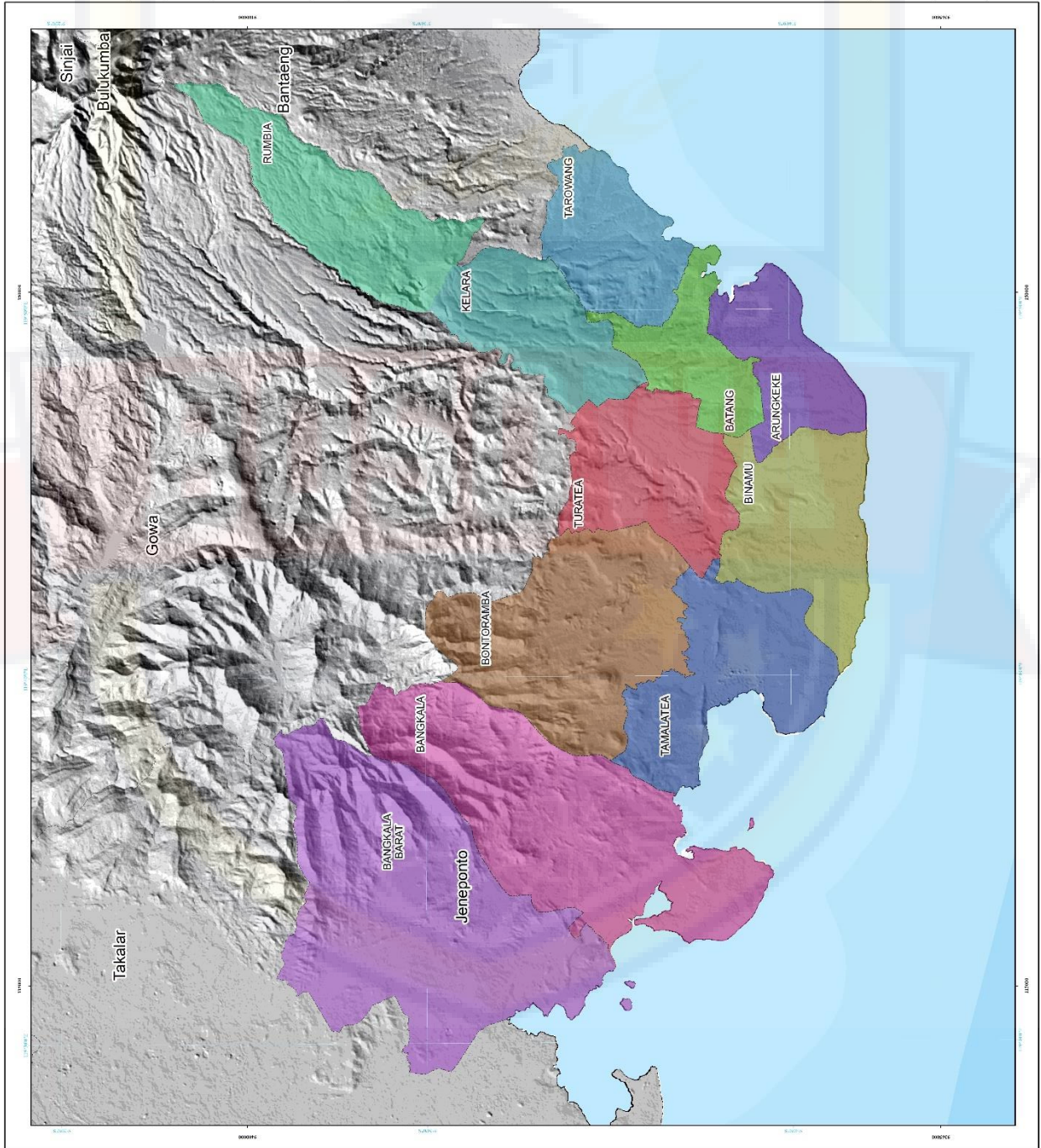
	KELARA
	KUMBIA
	TAMALATEA
	TAROWANG
	TURATEA
	BONTORAMBA
	ARUNGKEKE
	BANGKALA
	BANGKALA BARAT
	BATANG
	BINAMU
	BONTORAMBA

DOSEN :
Dr. Ir. Syafril, M.Si
Rusnani Ruslan, S.T, M.Si

MAHASISWA :
AMELIA MANGHEKALAH 4318042019

SUMBER PETA

- Peta Base Data Indonesia (BDDI) Skala 1:25.000 (data tahun 2017)
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto
- Rencana Kebijakan Sempadan Tahun 2019



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

2. Topografi dan Kelerengan

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (*flat*), berombak (*undulating*), bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*) hingga bergunung (*mountainous*). Pada bagian utara Kabupaten Jeneponto terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 mdpl, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl, dan pada bagian selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 mdpl. Topografi 0 sampai 200 mdpl tersebar dengan luasan 63.675.62 ha, atau sekitar 79,46% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih jelasnya mengenai topografi di Kabupaten Jeneponto sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Topografi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

Topografi (mdpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 - 5	4,833.70	6.03
5 - 10	4,982.87	6.22
10 - 20	8,522.91	10.64
20 - 30	7,164.32	8.94
30 - 40	6,222.71	7.77
40 - 50	4,761.50	5.94
50 - 60	3,927.72	4.90
60 - 70	3,410.65	4.26
70 - 80	3,007.52	3.75
80 - 90	2,619.84	3.27
90 - 100	2,119.99	2.65
100 - 200	12,101.88	15.10
200 - 300	4,911.15	6.13
300 - 400	2,932.01	3.66
400 - 500	2,309.34	2.88

Topografi (mdpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
500 - 600	1,541.64	1.92
600 - 700	1,132.50	1.41
700 - 800	820.25	1.02
800 - 900	553.28	0.69
900 - 1000	412.15	0.51
1000 - 1250	858.17	1.07
1250 - 1500	476.78	0.59
> 1500	509.92	0.64
Grand Total	80,132.80	100.00

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, yang telah diolah

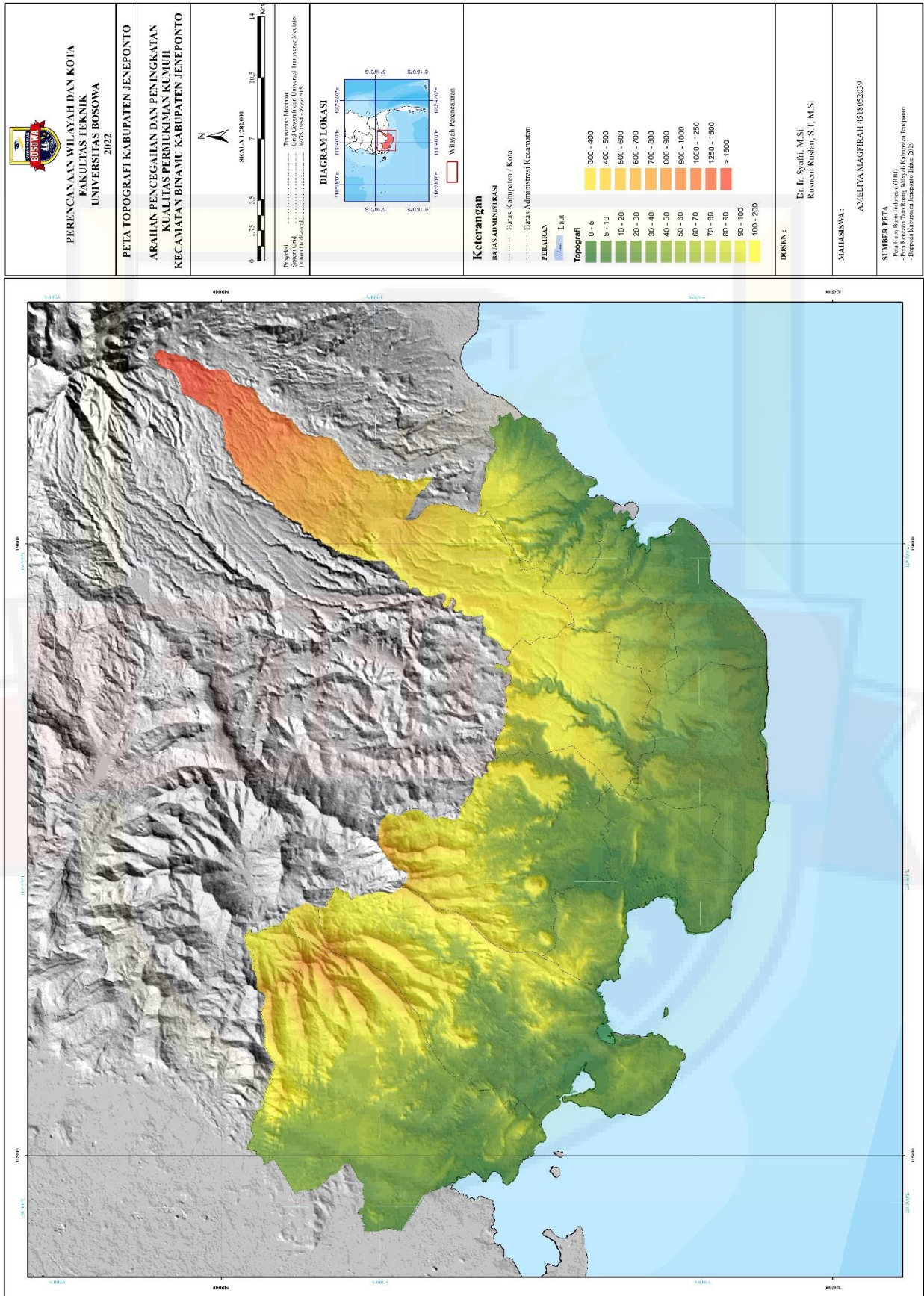
Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Jenis kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Jeneponto bervariasi mulai dari kategori datar (0-2%), landai bergelombang (2-5%), perbukitan berelief halus (5-15%), perbukitan berelief sedang (15-40%) dan perbukitan berelief kasar (>40%). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

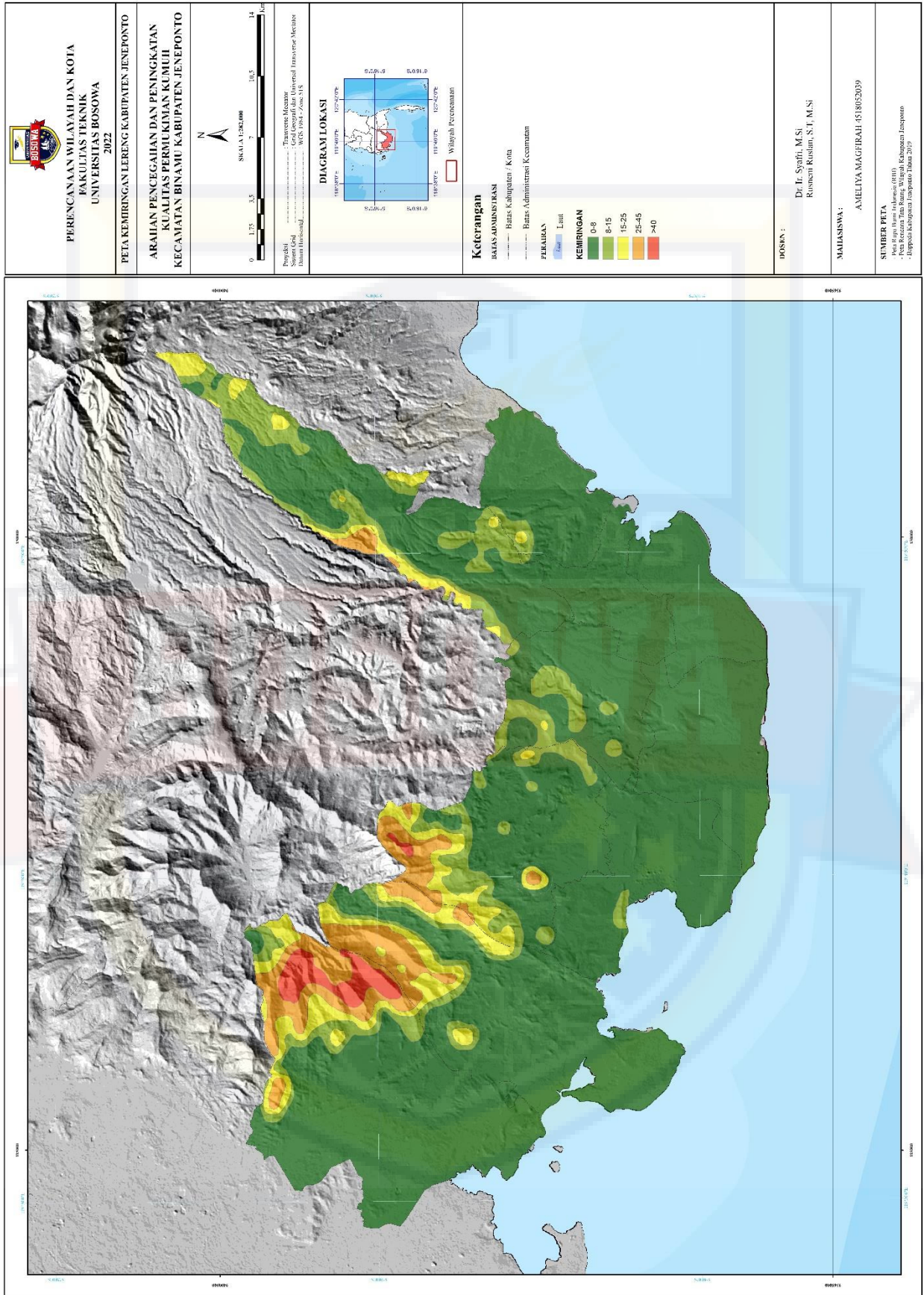
Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
0-2%	33,760.51	42.13
2 - 5%	22,910.37	28.59
5 - 15%	20,167.09	25.17
15 - 40%	3,283.61	4.10
>40%	11.21	0.01
Grand Total	80,132.80	100.00

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, yang telah diolah

Persentase kemiringan lereng terluas yaitu 0-2% seluas 33,760 ha atau 42.13 persen dari seluruh luas Kabupaten.



Gambar 4.2 Peta Topografi Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022



Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

3. Jenis Tanah

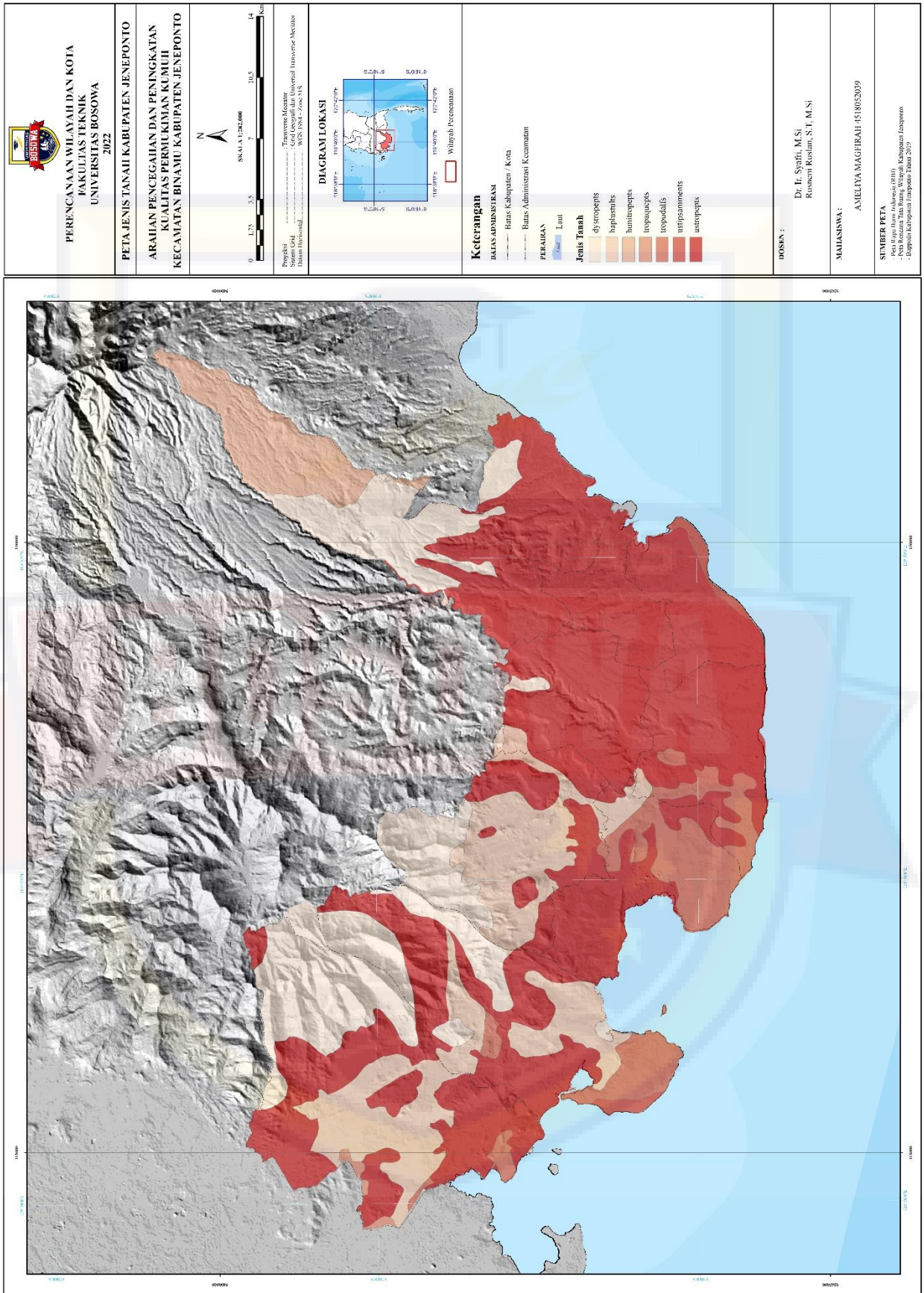
Tekstur tanah merupakan sifat yang menggambarkan kasar halusya tanah dalam perabaan yang ditentukan oleh perbandingan berat fraksi-fraksi penyusunnya. Suatu fraksi yang dominan pada suatu tanah akan menentukan ciri dan jenis yang bersangkutan. Jenis tanah di Kabupaten Jeneponto terbagi atas 7 jenis yaitu. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan jenis tanah di Kabupaten Jeneponto sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.4 Jenis Tanah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
Dystropepts	14,609.30	18.23
Haplustults	11,513.39	14.37
Hunitropepts	4,176.46	5.21
Tropaquepts	191.08	0.24
Tropudalfs	5,742.58	7.17
Ustipsamments	582.86	0.73
Ustropepts	43,317.13	54.06
Grand Total	80,132.80	100.00

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, yang telah diolah

Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Jeneponto adalah jenis ustropepts sekitar 54,06%, sedangkan jenis tanah dengan luasan paling sedikit adalah tropaquepts dengan luasan wilayah hanya sekitar 0,24% dari luas total jenis tanah di wilayah Kabupaten Jeneponto.



Gambar 4.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

4. Geologi

Geologi umum Kabupaten Jeneponto termasuk ke dalam Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Lembar Ujungpandang skala 1: 250.000. Kelompok batuan tua yang umumnya belum diketahui umurnya, terdiri dari batuan ultrabasa, batuan malihan dan batuan melange. Batuan tua ini tertindih secara tidak selaras oleh endapan *flysch* Formasi Balangbaru (Kb) yang berumur Kapur Akhir. Ciri litologinya hampir sama dengan Formasi Marada di daerah Kahu, terdiri dari serpih dan batusabak. Batuan gunungapi Paleosen (Tpv) terpropilitkan, menutup tidak selaras di atas batuan tersebut. Batuan gunungapi ini telah mengalami ubahan berkomposisi andesit hingga basal, terdiri dari tufa, breksi dan lava, berwarna kelabu tua hingga kehijauan, kadang dengan kekar-kekar yang terisi mineral kontak epidot yang sangat intensif, sehingga pada beberapa tempat kadang membentuk lensa atau diisi oleh urat kuarsa. Batuan breksinya, pada beberapa tempat disusun dari komponen aneka bahan, berukuran lapili hingga 50 cm. Di atas batuan serpih dan batuan gunungapi Paleosen tersebut diendapkan batuan sedimen darat dengan sisipan batubara Formasi Mallawa (Tem). Secara berangsur ke atasnya beralih menjadi endapan karbonat (batugamping) yang diperkirakan dari Formasi Tonasa (Temt). Formasi ini sebagian memperlihatkan batugamping padat kristalin berlapis dan sebagian merupakan

batugamping koral, tersebar luas di bagian barat menempati topografi tinggi membentuk bukit-bukit, diperkirakan berumur Miosen Tengah. Di sebagian bagian tengah dan utara daerah Blok Camba, tidak selaras di atas batugamping Formasi Tonasa ini terendapkan batuan sedimen berselingan dengan batuan gunungapi berumur Miosen Tengah hingga Pliosen, yang secara bersamaan membentuk Formasi Camba (Tmc). Kegiatan gunungapi masih terjadi selama Pliosen menghasilkan batuan gunungapi Baturappe-Cindako. Terobosan batuan beku yang terjadi di daerah ini semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunungapi tersebut. Bentuknya berupa stok, sil dan retas bersusunan mulai dari basal, andesit, trakit, diorit dan granodiorit. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan geologi di Kabupaten Jeneponto sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Geologi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Basal dan retal basal	7,239.83	9.03
Batuan Gunungapi	5,835.57	7.28
Batuan Gunungapi Lompobatang	22,077.79	27.55
Breksi, Lahar dan tupa	869.47	1.09
Endapan Aluvium dan Pantai	6,015.20	7.51
Endapan aluvium, danau dan pant	564.43	0.70
Formasi Camba	17,785.07	22.19
Formasi Tonasa	12,310.61	15.36
Hasil erupsi parasit	75.78	0.09
Lava	7,354.08	9.18
Pusat erupsi	4.99	0.01
Grand Total	80,132.80	100.00

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, yang telah diolah

5. Hidrologi dan Sumberdaya Air

Secara umum, Kabupaten Jeneponto dikenal sebagai daerah yang relatif kering dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Padahal, sesuai dengan data curah hujan, sebenarnya, wilayah yang kering di kabupaten ini hanya yang berada pada bagian pesisir, sementara dibagian utara (misalnya Kecamatan Rumbia dan Kelara) curah hujannya relatif tinggi.

Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Jeneponto terdiri dari sumber air permukaan dan prasarana sumber daya air. Sumber air permukaan di Kabupaten Jeneponto terdiri dari sungai, waduk dan embung, sedangkan prasarana sumber daya air di kabupaten Jeneponto terdiri dari sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Dimasa yang akan datang, upaya untuk mengelola sumberdaya air di Kabupaten Jeneponto, harus menjadi salah satu prioritas utama, mengingat pentingnya sumberdaya air bagi pembangunan di kabupaten ini. Upaya tersebut diantaranya, melalui pengelolaan daerah-daerah aliran sungai yang ada agar debit air sungai tidak mengalami fluktuasi yang tinggi antara musim hujan dan musim kemarau.

**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

PETA GEOLOGI KABUPATEN JENEPONTO

**ARAHAN Pencegahan dan Peningkatan
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
KECAMATAN BINA MU KABUPATEN JENEPONTO**

Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : Everest
Sistem Koordinat : UTM
WGS 1984 Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Keterangan

----- Batas Administrasi Kecamatan

----- Batas Kabupaten / Kota

----- Batas Administrasi Kecamatan

PERBAHAN

--- Laut

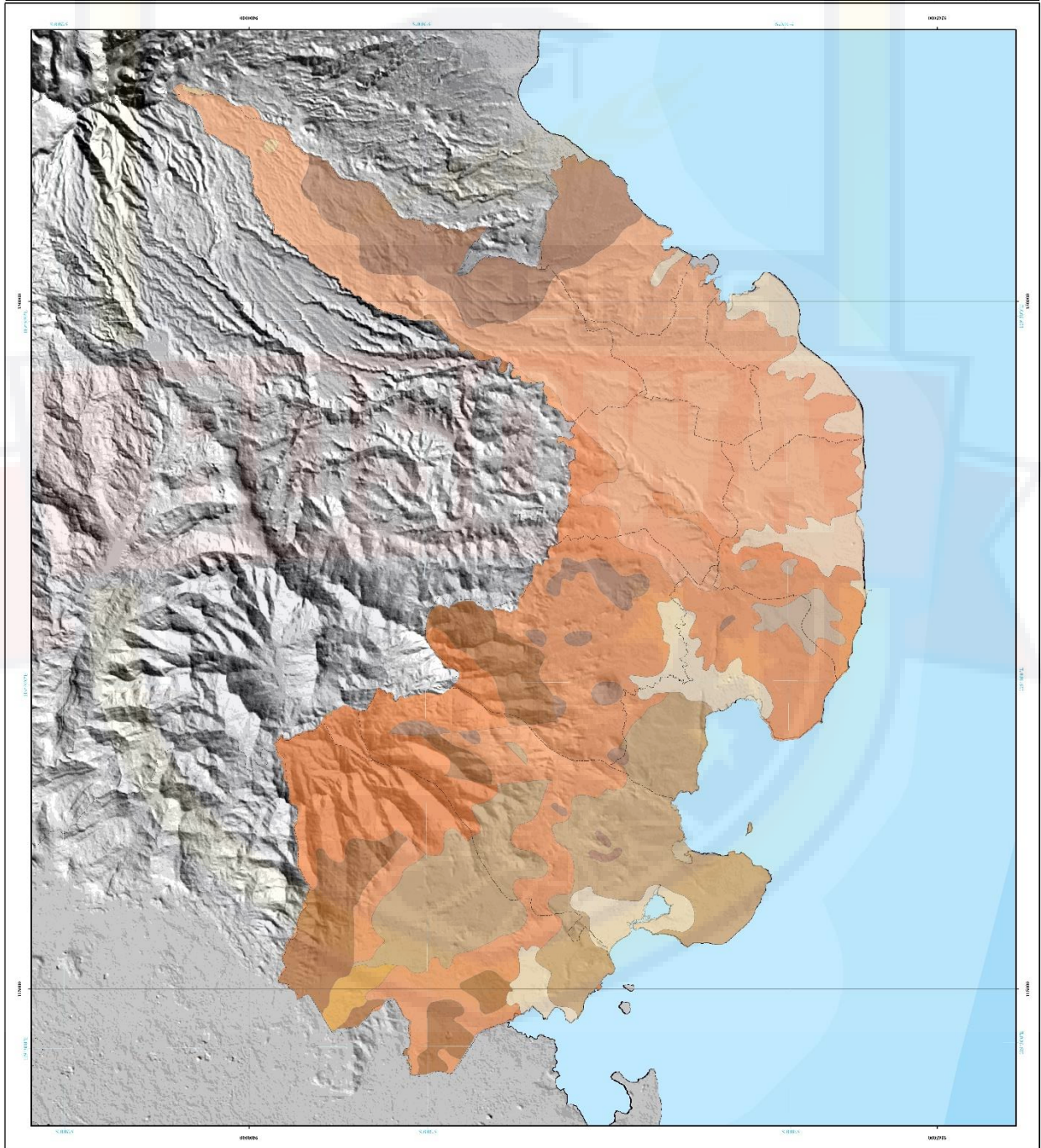
KORSIAN

- Basal dan ryal basal
- Batuam Gununggapi
- Batuam Gununggapi / ompobatang
- Breksi / lahar dan tupa
- Endapan Aluvium dan Pantai
- Endapan aluvium,danau dan pua
- Loransi Camba
- Lorangi Tonasa
- Hasil erupsi perasi
- Lava
- Pusat erupsi

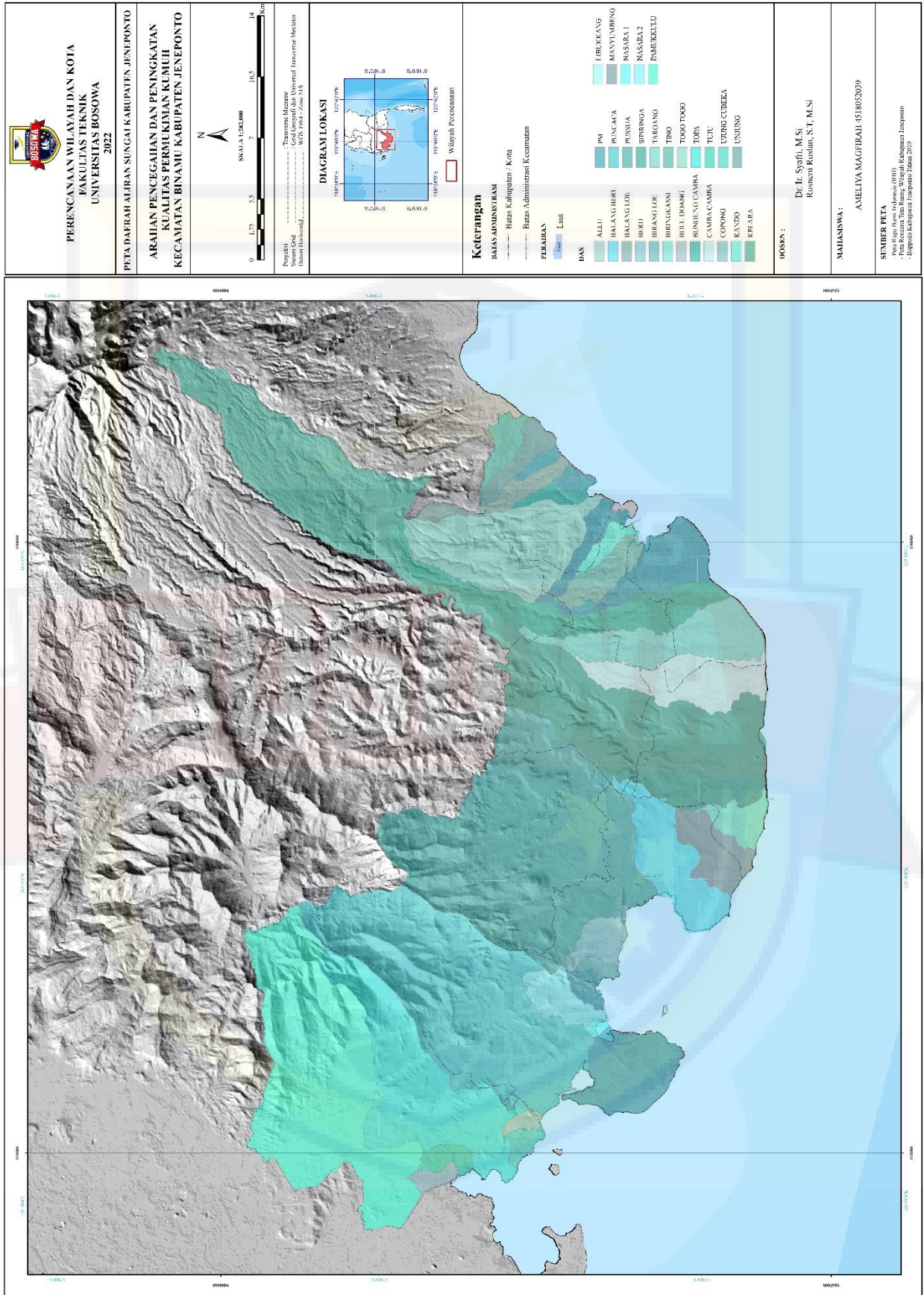
DOSISN :
Dr. Ir. Syarif, M.Si
Rusemi Ruslim, S.I, M.Si

MALIASINWA :
AMELIYA MAGEBAH 9518052019

SUMBER PETA
- Data Topografi Indonesia (1:100,000)
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto
- Laporan Kabupaten Jeneponto Tahun 2017



Gambar 4.5 Peta Geologi Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022



Gambar 4.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

6. Klimatologi

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kabupaten Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisoro, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049 – 3973mm / tahun.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan tersebut, maka type iklim Kabupaten Jeneponto termasuk type iklim agak basah sampai kering. Curah hujan yang mendominasi wilayah Kabupaten Jeneponto adalah curah hujan 2086 mm/tahun sekitar 41,30%, sedangkan curah hujan 2615 mm/tahun dengan luasan paling sedikit, hanya sekitar 3,03% dari luas total wilayah Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Curah Hujan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

Curah Hujan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1116 mm/tahun	12,436.16	15.52
1890 mm/tahun	24,263.49	30.28
2086 mm/tahun	33,096.29	41.30
2329 mm/tahun	3,746.44	4.68
2615 mm/tahun	2,427.07	3.03
3973 mm/tahun	4,163.34	5.20
Grand Total	74,980	100.00

Sumber: Peta RBI Skala 1:50.000, BIG, yang telah diolah

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil analisis spasial tahun 2022 terdiri dari danau, hutan bakau/mangrove, hutan rawa/gambut, hutan rimba, padang rumput, pasir, perkebunan, permukiman dan tempat kegiatan, rawa, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tambak, tanah gosong/gundul, tegalan/ladang, dan tubuh air. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Jeneponto sebagaimana pada tabel 4.7

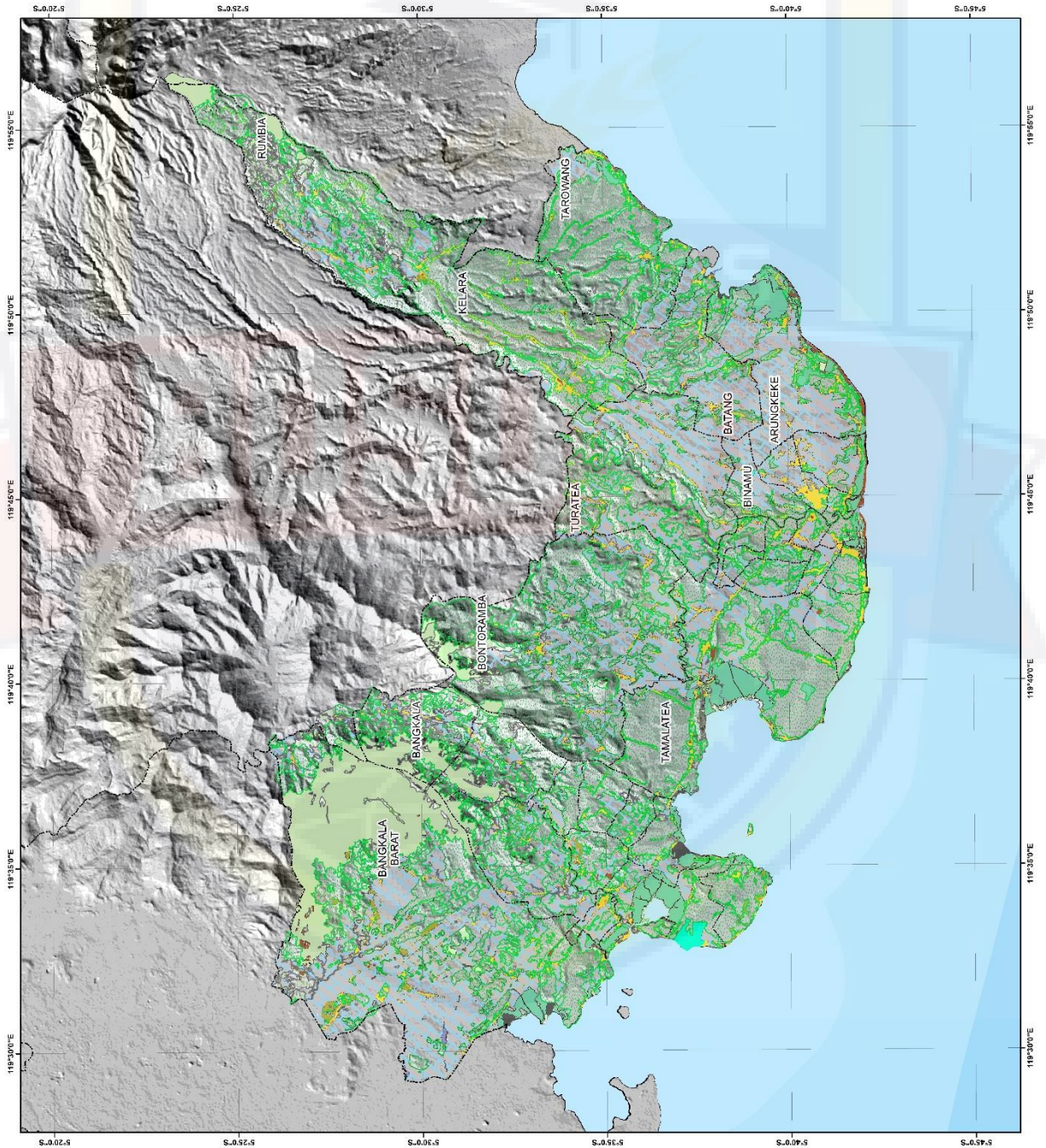
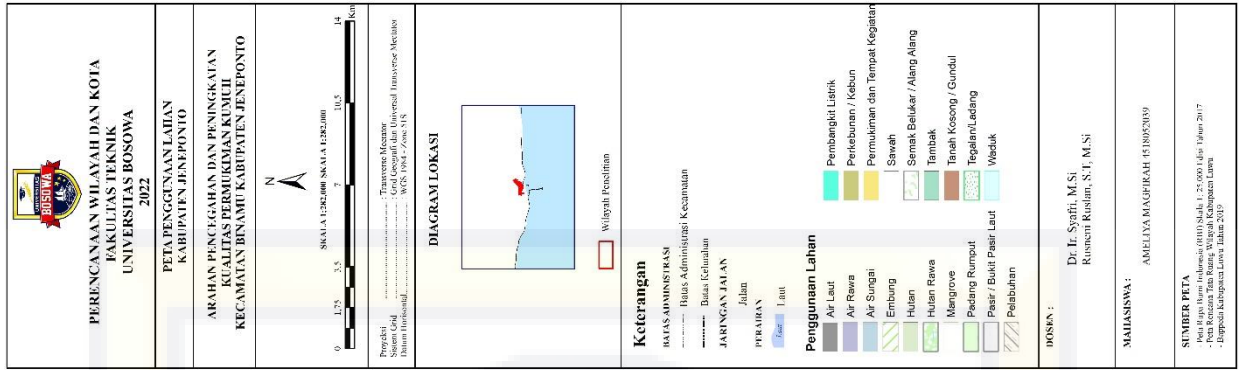
**Tabel 4.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jeneponto
Tahun 2022**

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Air Laut	148.47	0.19
2	Air Rawa	33.65	0.04
3	Air Sungai	358.24	0.45
4	Hutan	5,316.08	6.63
5	Hutan Rawa	11.47	0.01
6	Mangrove	135.73	0.17
7	Padang Rumput	340.28	0.42

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
8	Pasir / Bukit Pasir Laut	57.40	0.07
9	Pelabuhan	2.66	0.00
10	Pembangkit Listrik	170.10	0.21
11	Perkebunan / Kebun	309.95	0.39
12	Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,801.95	4.74
13	Sawah	26,699.79	33.32
14	Semak Belukar / Alang Alang	3,998.89	4.99
15	Tambak	2,353.53	2.94
16	Tanah Kosong / Gundul	245.43	0.31
17	Tegalan/Ladang	36,149.16	45.11
Grand Total		80,132.80	100.00

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2022

Jenis penggunaan lahan dengan persentase luas terbesar di wilayah Kabupaten Jeneponto berupa tegalan/ladang sekitar 45,11% dari luas total wilayah kabupaten. Jenis penggunaan lahan terbesar kedua adalah sawah seluas 33,32%. Areal permukiman dengan lahan pekarangan yang dimiliki, umumnya ditanami dengan tanaman pekarangan seperti mangga, srikaya, dan kelapa, sedangkan areal yang teridentifikasi sebagai lahan semak belukar/alang-alang, banyak dimanfaatkan untuk pertanaman jagung, terutama dimusim hujan. Untuk lahan kebun dan lahan kering lainnya, komoditas utama yang banyak dijumpai adalah jambu mete, mangga, atau ditumbuhi dengan tanaman lontar (*Borassus flabellifer* L.).



Gambar 4.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

8. Kependudukan

Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah yang masih berkembang dengan penambahan penduduk masih berfluktuasi meningkat. Berdasarkan buku Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2022 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2021 sebanyak 405.508 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Bangkala	121,82	60.091	493	99,0
2	Bangkala Barat	152,96	30.785	201	98,2
3	Tamalatea	57,58	50.206	872	99,8
4	Bontoramba	88,30	40.358	457	87,5
5	Binamu	69,49	64.399	927	98,5
6	Turatea	53,76	35.425	659	97,4
7	Batang	33,04	21.634	655	93,6
8	Arungkeke	29,91	21.519	719	94,4
9	Tarowang	40,68	24.958	614	98,4
10	Kelara	43,95	30.516	694	97,4
11	Rumbia	58,30	25.617	439	95,8
Jeneponto		749,79	405.308	541	97,8

Sumber: Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 yaitu di Kecamatan Binamu sebanyak 64.399 jiwa dengan kepadatan penduduk 927 jiwa/km²

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BINAMU

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kecamatan Binamu merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang merupakan ibu kota Kabupaten Jenepono (Bontosunggu). Wilayah administrasi Kecamatan Binamu terdiri atas 1 desa dan 12 kelurahan dan memiliki luas 69,49 km² atau 9.27% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Jenepono. Adapun batas administrasi Kecamatan Binamu yaitu sebagai berikut.

- Sebelah Utara: Kecamatan Turatea
- Sebelah Timur: Kecamatan Arungkeke dan Batang
- Sebelah Selatan: Laut Flores
- Sebelah Barat: Kecamatan Tamalatea

Adapun luas dan pembagian administrasi Kecamatan Binamu sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan/Desa di Kecamatan Binamu Tahun 2020

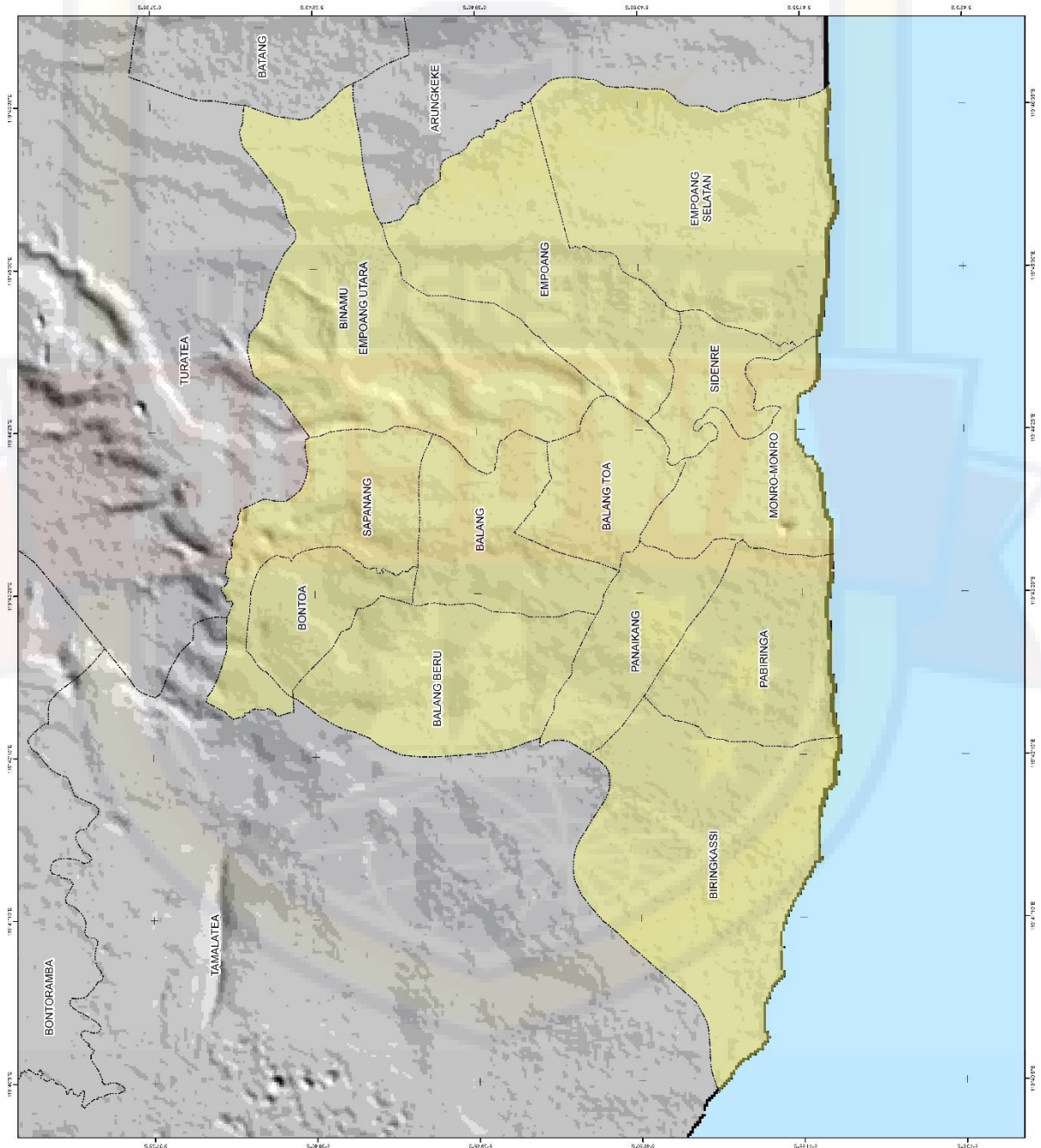
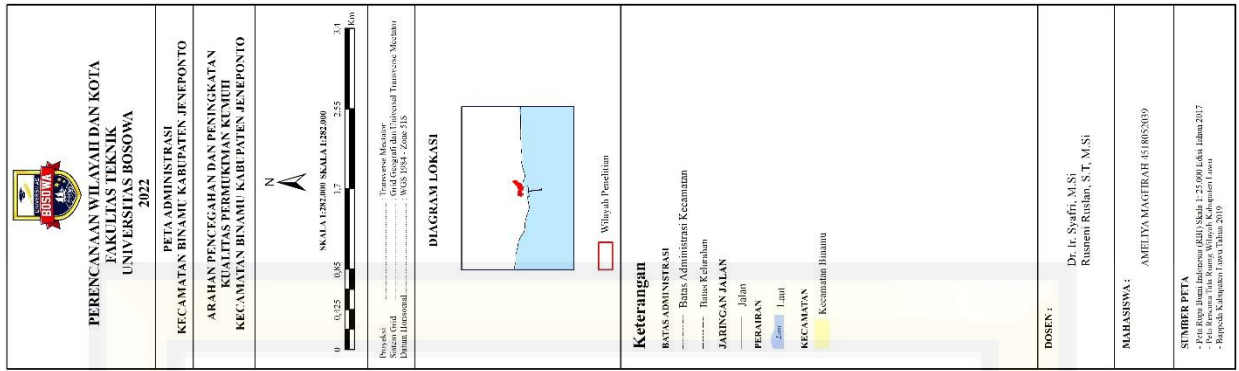
No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Balang	4,02	5.8
2	Balang Beru	5,04	7.3
3	Balang Toa	2,93	4.2
4	Biringkassi	8,73	12.6
5	Bontoa	4,13	5.9
6	Empoang	9,45	13.6
7	Empoang Selatan	8,01	11.5
8	Empoang Utara	10,09	14.5
9	Monro-Monro	4,28	6.2

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
10	Pabiringa	2,91	4.2
11	Panaikang	3,14	4.5
12	Sapanang	3,87	5.6
13	Sidenre	3,19	4.6
Total		69,49	100,00

Sumber: Kecamatan Binamu dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kelurahan/desa terluas yaitu Kelurahan Empoang dengan luas 9,45 km² atau 13,6% dari luas Kecamatan Binamu, sedangkan kelurahan/desa terluas kedua yaitu Kelurahan Biringkassi dengan luas 8,73 km² atau 12,6% dari luas keseluruhan Kecamatan Binamu.

Kelurahan/desa terkecil di Kecamatan Binamu yaitu Kelurahan Pabiringa dengan luas 2,91 km² Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 4.8 Peta Administrasi Kecamatan Binamu
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kecamatan Binamu memiliki topografi dan lereng yang relatif datar serta berada pada daerah dataran rendah dan pesisir. Ditinjau dari sisi lereng, maka secara garis esar Kecamatan Binamu juga berada pada daerah kelerengan antar 0 – 8%. Hal ini sangat berpotensi dalam pengembangan penggunaan lahan.

3. Geologi dan Jenis Tanah

Jenis tanah yang tersebar di Kecamatan Binamu yaitu tanah haplustults, tropudalfs dan ustropepts. *Haplustalfs* adalah great group dari ordo tanah Alfisol. Jenis tanah ini mempunyai kandungan liat tinggi pada horison B yang dikenal sebagai horizon argilik. *Tropudalfs* adalah great group dari ordo tanah Alfisol. Jenis tanah ini mempunyai kandungan liat tinggi pada horison B yang dikenal sebagai horizon argilik. Batuan geologi yang tersebar di Kecamatan Binamu yaitu Batuan Gunung Api Lompobattang, Breksi, Lahar, dan Tupa, Endapan Aluvium dan Pantai, serta Batuan Formasi Camba.

4. Hidrologi dan Sumberdaya Air

Penetapan dan pembagian wilayah sungai dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya usaha-usaha perlindungan, pengembangan air secara menyeluruh dan terpadu pada satu daerah pengaliran sungai atau lebih, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Pengelolaan DAS merupakan pokok dari pengelolaan sumberdaya air secara efektif karena lingkup ruang yang dimiliki oleh DAS. Sumber air permukaan di Kecamatan Binamu terdiri atas Daerah Aliran Sungai Balang Sippringa.

5. Kependudukan

Kecamatan Binamu merupakan ibukota dari Kabupaten Jeneponto (Bontosunggu). Oleh karena itu, perkembangan penduduk di Kecamatan Binamu selalu mengalami penambahan disetiap tahunnya. Berdasarkan buku Kecamatan Binamu dalam Angka 2021, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 63.570 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kecamatan Binamu Tahun 2020

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Balang	4,02	5641	1403
2	Balang Beru	5,04	4078	809
3	Balang Toa	2,93	4607	1752
4	Biringkassi	8,73	3847	441
5	Bontoa	4,13	2996	725
6	Empoang	9,45	10503	1111
7	Empoang Selatan	8,01	6777	846
8	Empoang Utara	10,09	4261	422
9	Monro-Monro	4,28	2973	695
10	Pabiringa	2,91	7165	2462
11	Panaikang	3,14	2714	864
12	Sapanang	3,87	3770	974
13	Sidenre	3,19	4238	1329
Total		69,49	63.570	915

Sumber: Kecamatan Binamu dalam Angka 2021

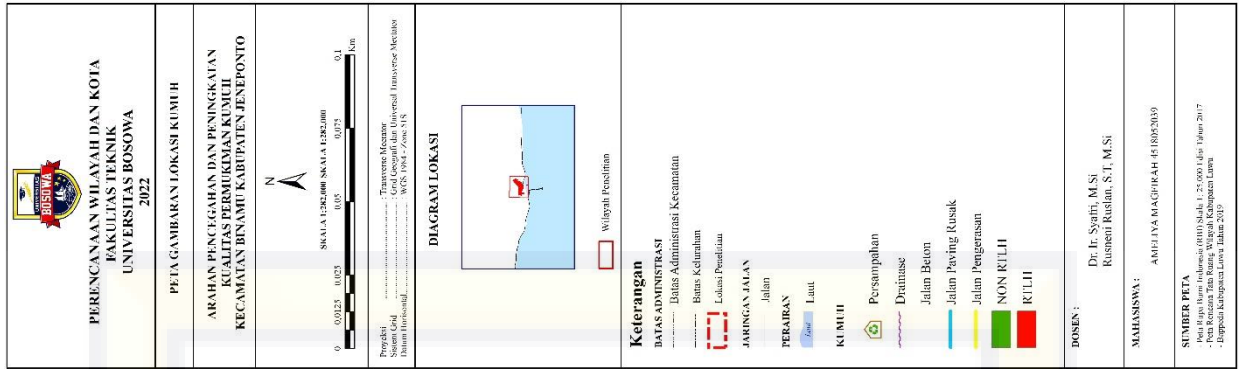
C. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Letak Geografis dan Administrasi

Lokasi penelitian terletak di Kawasan Biringjene, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lebih tepatnya berada di Lingkungan Tanrusampe Barat dan Lingkungan Tanrusampe Timur dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan kawasan yang menjadi lokasi permukiman kumuh sedang berdasarkan SK Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2-16 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto.

Secara administrasi Kawasan Biringjene memiliki luas 3.90 ha yang terbagi atas 2 lingkungan dan 2 RT, dengan letak geografis LS $5^{\circ} 42' 2,827''$ BT $119^{\circ} 42' 30,267''$. Adapun batas administrasi Kawasan Biringjene yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Lingkungan Bonto-Bonto Timur, Kelurahan Panaikang
- Sebelah Timur: Lingkungan Tamarunang, Kelurahan Pabiringa
- Sebelah Selatan: Laut Flores
- Sebelah Barat: Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa



Gambar 4.9 Peta Lokasi Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

2. Profil dan Karakteristik Kawasan Penelitian

a. Urbanisasi

Data urbanisasi dalam penelitian ini yaitu data migrasi masuk seumur hidup dan data migrasi keluar seumur hidup Kabupaten Jeneponto. Data migrasi masuk dan migrasi keluar didapatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Adapun data urbanisasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Jumlah Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jeneponto, 2021

No	Urbanisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Migrasi Masuk	2,085	3,128	5,213
2	Migrasi Keluar	4,886	7,299	12,164

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jeneponto, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Kabupaten Jeneponto tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya migrasi keluar Kabupaten Jeneponto daripada migrasi masuk ke Kabupaten Jeneponto.

b. Lahan Perkotaan

Lahan perkotaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu sebaran penggunaan lahan perkotaan pada pada tahun 2012 dan 2022 lokasi penelitian untuk melihat perubahan penggunaan lahan dalam waktu 10 tahun terakhir. Data lahan perkotaan

didapatkan melalui hasil pengolahan GIS dan survei primer di Kelurahan Pabiringa. Untuk lebih jelasnya mengenai lahan perkotaan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Penggunaan Lahan Tahun 2012 dan 2022 di Kelurahan Pabiringa

Penggunaan Lahan Tahun 2012	Penggunaan Lahan Tahun 2022	Total (ha)
Sawah	Padang Rumput	0.416
	Pasir / Bukit Pasir Laut	1.014
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	9.151
	Sawah	77.933
	Tambak	1.154
	Tanah Kosong / Gundul	0.215
	Tegalan/Ladang	46.511
Tambak	Air Laut	1.197
	Air Sungai	0.992
	Mangrove	1.093
	Pasir / Bukit Pasir Laut	0.149
	Semak Belukar / Alang Alang	1.123
	Tambak	4.182
	Tanah Kosong / Gundul	1.870
Tegalan/Ladang	Air Laut	0.006
	Air Sungai	1.420
	Mangrove	2.255
	Padang Rumput	4.875
	Pasir / Bukit Pasir Laut	0.303
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	59.811
	Sawah	27.665
	Semak Belukar / Alang Alang	2.515
	Tambak	6.338
	Tanah Kosong / Gundul	0.914
	Tegalan/Ladang	152.524
Total		405.627

Sumber: Hasil Pengolahan GIS dan Survey Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kelurahan Pabiringa dalam waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022, penggunaan lahan terluas di Kelurahan Pabiringa yaitu permukiman dan tempat kegiatan.

c. Sarana Prasarana

1) Bangunan Gedung

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan, kondisi bangunan gedung di Kawasan Biringjene memiliki banyak bangunan yang tidak teratur. Banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dengan kondisi lantai yang beberapa rumah masih menggunakan lantai dasar yang membuat tingkat kenyamanan berkurang. Selain itu, masih banyaknya bangunan yang memiliki atap rumah yang kurang layak.

2) Kondisi Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan prasarana penghubung antar wilayah atau kawasan, oleh karena itu dibutuhkan sasaran dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi standar sesuai teknis lebar badan jalan sehingga apabila dalam

keadaan mendesak membuat mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjemput masyarakat yang membutuhkan.

3) Kondisi Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi penyediaan air bersih belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas. Mayoritas masyarakat menggunakan sumur bor dan air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

4) Kondisi Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi sistem jaringan drainase yang terdapat di lokasi penelitian merupakan sistem jaringan drainase terbuka yang mengikuti pola jaringan jalan. Kondisi drainase masih kurang baik dan tidak sesuai persyaratan teknis karena belum dapat mengalirkan air hujan yang disebabkan banyaknya sampah yang menumpuk, serta masih banyaknya panjang jalan yang tidak dilengkapi dengan drainase.

5) Kondisi Pengolahan Air Limbah

Dalam melakukan kegiatan mandi, mencuci, buang air besar dan kecil akan menghasilkan air limbah. Berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pengolahan air

limbah di lokasi penelitian kurang baik karena masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

6) Kondisi Persampahan

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai kondisi persampahan di lokasi penelitian tidak sesuai persyaratan teknis. Tidak adanya sistem pengelolaan persampahan dikarenakan masyarakat cenderung membuang sampah dilaut. Selain itu, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk pengolahan sampah.

7) Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, tidak tersedianya hydran kebakaran pada lokasi penelitian, dan juga jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis yang tidak bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

d. Sosial Ekonomi

1) Jumlah Penduduk

Kelurahan Pabiringa merupakan salah satu kelurahan/desa yang terdapat di Kecamatan Binamu. Berdasarkan data dari WebGIS Kemendagri Dukcapil dan Kantor Kelurahan Pabiringa, jumlah penduduk Kelurahan Pabiringa tahun 2021

sebanyak 7.503 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2.182 KK yang terbagi atas 5 lingkungan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Menurut Lingkungan di Kelurahan Pabiringa, Tahun 2021

No	Lingkungan	Jumlah (jiwa)
1.	Tanusampe Barat	1.022
2.	Tanusampe Timur	1.389
3.	Tamarunang	1.842
4.	Jeneponto	1.458
5.	Maccini Baji	1.792
Jumlah		7.503

Sumber: WebGIS Dukcapil dan Database Penduduk Kel. Pabiringa, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Pabiringa berada di Lingkungan Tamarunang sebanyak 1.842 jiwa. Hal ini disebabkan karena Lingkungan Tamarunang merupakan pusat kegiatan di Kelurahan Pabiringa.

2) Tingkat Pendidikan

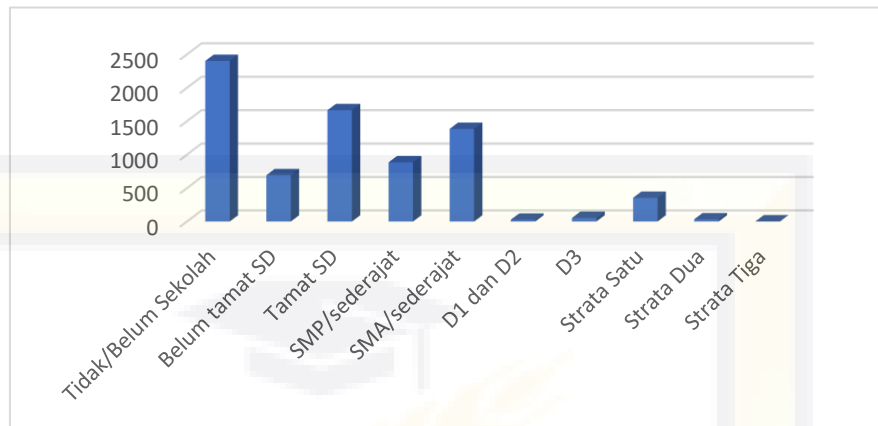
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan didapatkan dari data kependudukan yang diterbitkan melalui WebGIS Dukcapil Tahun 2022. Klasifikasi tingkat pendidikan di Kelurahan Pabiringa terdiri atas tidak/belum sekolah, belum

tamat SD, tamat SD, SMP, SMA, D1 dan D2, D3, S1, S2, serta S3. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Pabiringa secara keseluruhan dapat melihat tabel dan grafik dibawah.

Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pabiringa, Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Tidak/Belum Sekolah	2.402
2.	Belum Tamat SD	693
3.	Tamat SD	1.665
4.	SMP/ sederajat	886
5.	SMA/ sederajat	1.386
6.	D1 dan D2	27
7.	D3	54
8.	Strata Satu (S1)	354
9.	Strata Dua (S2)	34
10.	Strata Tiga (S3)	2
Jumlah		7.503

Sumber: WebGIS Dukcapil, 2022



Gambar 4.10
Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu tidak/belum sekolah sebanyak 2.402 jiwa.

3) Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan pada penelitian ini diukur dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2018-2020. Data Indeks Pembangunan Manusia didapatkan melalui *website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai IPM Kabupaten Jeneponto sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jeneponto, 2018-2020

No	Tahun	IPM
1.	2018	63,33
2.	2019	64,00

No	Tahun	IPM
3.	2020	64,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian IPM di Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan konstan. Pada tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Jeneponto mencapai 64,26% dengan kategori IPM sedang.

4) Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat di Kelurahan Pabiringa cukup variatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pabiringa, mayoritas masyarakat di Kelurahan Pabiringa tidak bekerja, nelayan, dan petani rumput laut, dengan penghasilan yang tidak menentu. Penghasilan yang didapatkan untuk seorang nelayan berkisar Rp. 50.000 untuk sekali memancing, sedangkan untuk seorang petani rumput laut mendapat penghasilan sekitar Rp.10.000/hari dalam satu minggu. Adapun untuk profesi ASN dan sederajat mendapatkan pendapatan setara dengan UMR Kabupaten Jeneponto.

5) Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan didapatkan dari data kependudukan yang diterbitkan melalui WebGIS Dukcapil Tahun 2022. Klasifikasi jenis pekerjaan di Kelurahan Pabiringa terdiri atas belum/tidak bekerja, aparatur pejabat negara, tenaga pengajar, wiraswasta, pertanian dan peternakan, nelayan, pelajar dan mahasiswa, tenaga kesehatan, pensiunan serta pekerjaan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kelurahan Pabiringa secara keseluruhan dapat melihat tabel dan grafik dibawah

Tabel 4.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Pabiringa, 2021

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1.	Belum/Tidak Bekerja	2.518
2.	Aparatur Pejabat Negara	303
3.	Tenaga Pengajar	28
4.	Wiraswata	611
5.	Pertanian dan Peternakan	368
6.	Nelayan	642
7.	Pelajar dan Mahasiswa	1.200
8.	Tenaga Kesehatan	3

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
9.	Pensiunan	108
10.	Pekerjaan Lainnya	1.638
Jumlah		7.503

Sumber: WebGIS Dukcapil, 2022

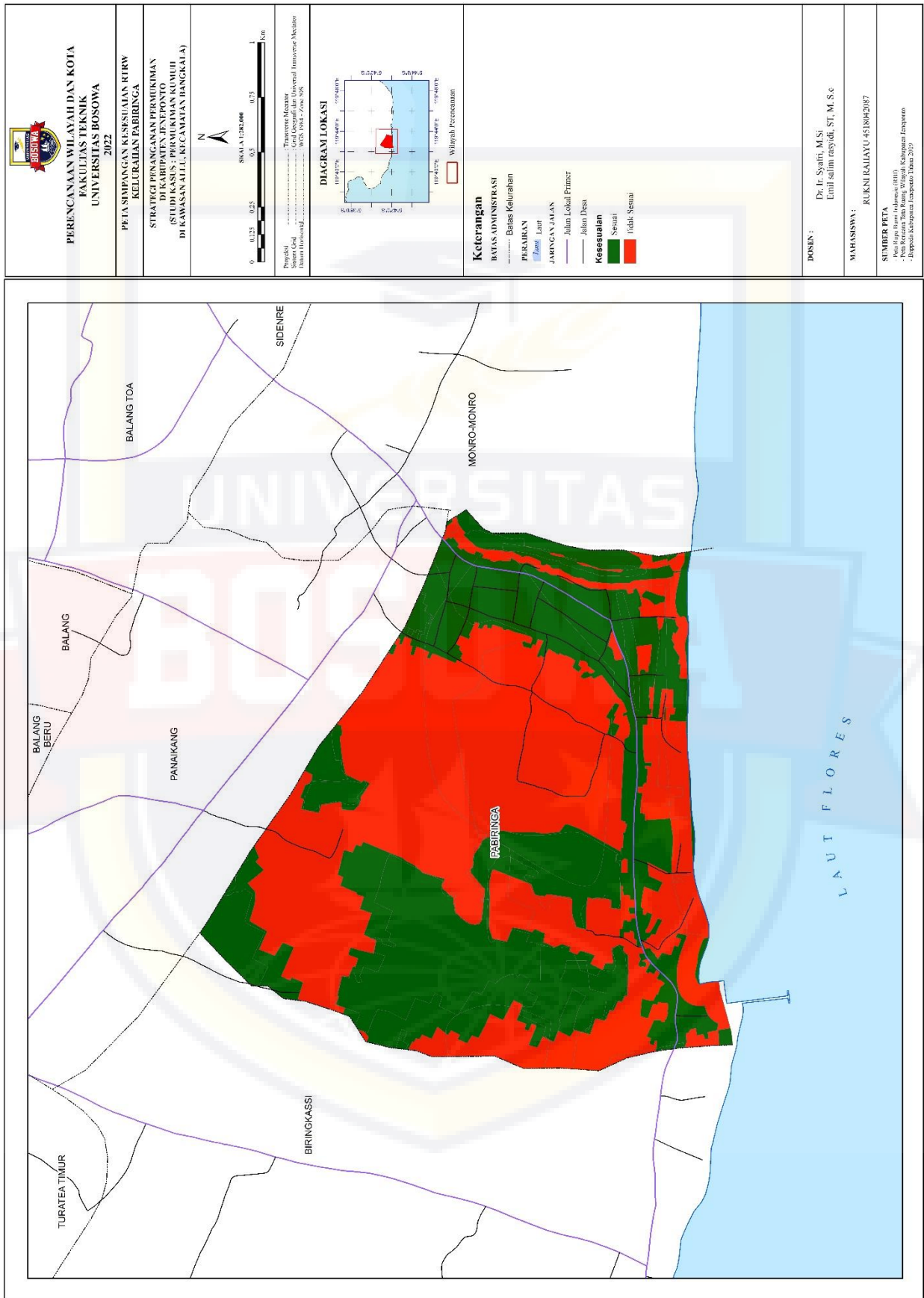


Gambar 4.11
Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan terbanyak di Kelurahan Pabiringa yaitu belum/tidak bekerja sebanyak 2.518 jiwa.

e. Tata Ruang

Tata Ruang pada penelitian ini yaitu melakukan analisis *superimpose* antara peta guna lahan eksisting dengan peta pola ruang RTRW. Analisis simpangan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemanfaatan ruang yang telah dilakukan sudah sesuai dengan RTRW atau belum. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada peta berikut.

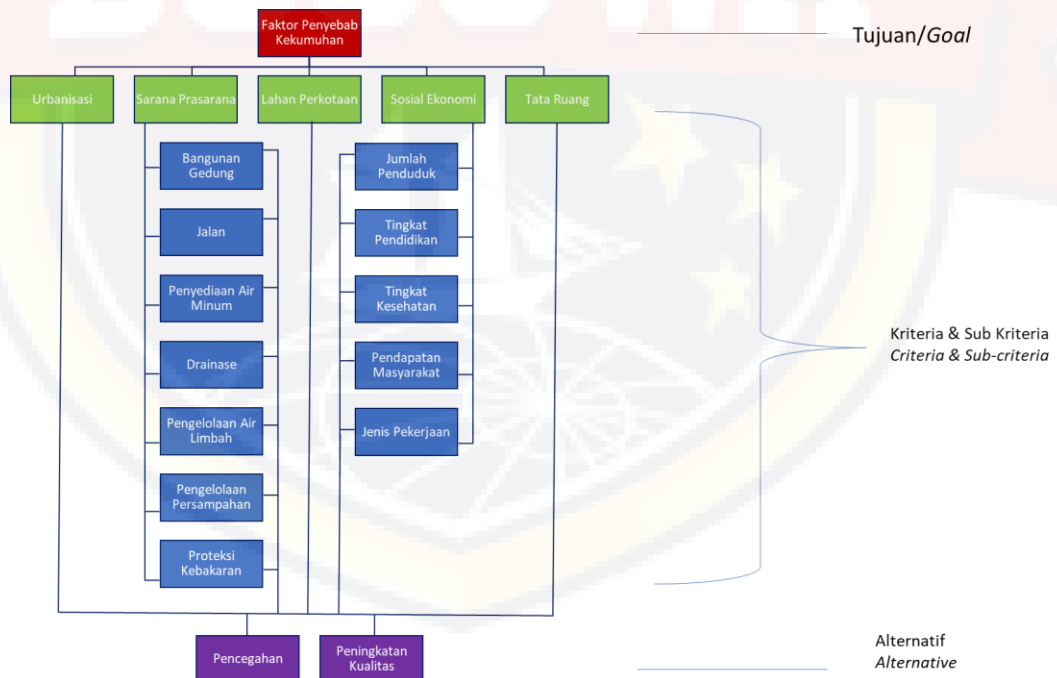


**Gambar 4.12 Peta Simpangan RTRW dengan Guna Lahan
Kel. Pabiringa**

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

D. ANALISIS PENYEBAB KEKUMUHAN

Untuk menjawab penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dimana terdapat 6 *stakeholders* yang memberikan pertimbangannya dalam menentukan penyebab kekumuhan. Berdasarkan Teori Saaty (2008), dibutuhkan tujuan (*goal*), kriteria (*criteria*), sub-kriteria (*sub-criteria*) dan alternatif (*alternative*) untuk menyusun struktur hierarki AHP. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan penyebab kekumuhan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan, kriterianya adalah faktor-faktor penyebab kumuh, sedangkan sub-kriterianya adalah indikator-indikator dari faktor penyebab kumuh. Adapun struktur hierarki dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut



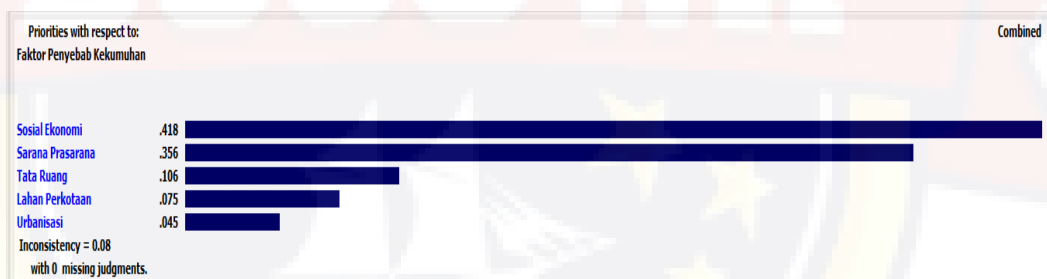
Gambar 4.13 Struktur Hierarki AHP dalam Penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya melakukan perhitungan menggunakan *software Expect Choice*. Adapun hasil analisis penyebab kekumuhan dengan menggunakan analisis AHP yaitu sebagai berikut.

1. Hasil Analisis Antar Kriteria

Berdasarkan hasil analisis antar kriteria menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,08 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 1%. Adapun faktor penyebab beserta bobotnya dari tinggi ke rendah adalah sosial ekonomi (0,418), sarana prasarana (0,356), tata ruang (0,106), lahan perkotaan (0,075), dan bobot terendah yaitu urbanisasi (0,045). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut



Gambar 4.14 Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Kriteria

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa variabel sosial ekonomi merupakan faktor dengan bobot tertinggi dan menjadi penyebab kekumuhan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat sosial ekonomi di Kawasan Biringjene, seperti masih

rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan masyarakat
tingginya jenis pekerjaan informal.

2. Hasil Analisis Antar Sub Kriteria

a. Urbanisasi

Hanya terdapat satu indikator pada sub variabel ini, yaitu urbanisasi, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

b. Lahan Perkotaan

Hanya terdapat satu indikator pada sub variabel ini, yaitu lahan perkotaan, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya

c. Sarana Prasarana

Hasil analisis antar sub kriteria sarana prasarana menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,08 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini dibawah 1%. Nilai bobot penyebab kekumuhan dari tinggi ke rendah yaitu kondisi proteksi kebakaran (0,250), kondisi persampahan (0,180), kondisi air bersih (0,160), kondisi drainase (0,140), kondisi air limbah (0,100), kondisi jalan (0,087) dan kondisi bangunan (0,084). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut.



Gambar 4.15 Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Sub Kriteria Sarana Prasarana

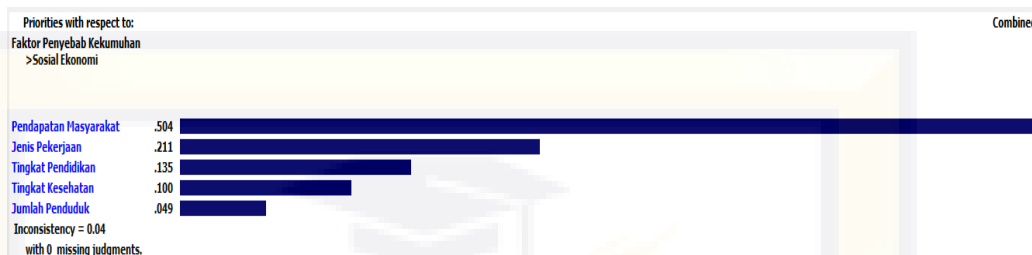
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa penyebab kekumuhan ditinjau dari sarana prasarana di Kawasan Biringjene yaitu kondisi proteksi kebakaran. Hal ini disebabkan karena pada lokasi penelitian tidak tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Bobot tertinggi kedua tertinggi yaitu kondisi persampahan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sarana dan prasarana sesuai persyaratan teknis sehingga menjadi penyebab kekumuhan.

d. Sosial Ekonomi

Hasil analisis antar sub kriteria sosial ekonomi menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,04 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini dibawah 1%. Penyebab kekumuhan beserta bobotnya dari tinggi ke rendah adalah pendapatan masyarakat (0,504), jenis pekerjaan (0,211), tingkat pendidikan (0,135), tingkat kesehatan (0,100), dan bobot

terendah sub kriteria jumlah penduduk (0,049). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut.



Gambar 4.16 Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Sub Kriteria Sosial Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan diagram diatas mengindikasikan bahwa penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene ditinjau dari sub kriteria sosial ekonomi adalah pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memiliki hunian yang layak huni, sehingga menyebabkan kekumuhan.

e. Tata Ruang

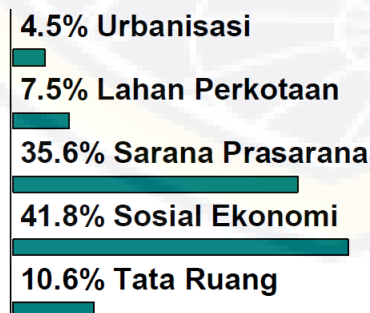
Hanya terdapat satu indikator pada sub variabel ini, yaitu tata ruang, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

Setelah melakukan perhitungan menggunakan *software Expert Choice*, data diakumulasikan untuk melihat faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Rekapitulasi Nilai Faktor Penyebab Kekumuhan

Kriteria	Sub Kriteria
Urbanisasi (0,045)	Migrasi Penduduk
Lahan Perkotaan (0,075)	Penggunaan Lahan
Sarana Prasarana (0,356)	Kondisi Bangunan (0,084)
	Kondisi Jalan (0,087)
	Kondisi Drainase (0,140)
	Kondisi Air Bersih (0,160)
	Kondisi Limbah (0,100)
	Kondisi Persampahan (0,180)
	Kondisi Proteksi Kebakaran (0,250)
Sosial Ekonomi (0,418)	Jumlah Penduduk (0,049)
	Tingkat Pendidikan (0,135)
	Tingkat Kesehatan (0,100)
	Pendapatan Masyarakat (0,504)
	Jenis Pekerjaan (0,211)
Tata Ruang (0,106)	Simpangan Pola Ruang dan Penggunaan Lahan

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4.17 Rekapitulasi Faktor Penyebab Kekumuhan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa menurut pendapat *stakeholder*, faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene yaitu faktor sosial ekonomi dengan presentase 41.8%. Hal ini disebabkan karena faktor pendapatan masyarakat, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

E. ANALISIS PENENTUAN ARAHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Dalam penentuan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif dari hasil analisis AHP untuk menentukan rumusan strategi. Penilaian secara keseluruhan perlu dilakukan untuk mengetahui alternatif terbaik menurut pendapat *stakeholder*. Adapun rumusan strategi menurut para *stakeholder* sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.18 Rekapitulasi Nilai Alternatif

Kriteria	Sub Kriteria	Pencegahan	Peningkatan Kualitas
Urbanisasi (0,045)	Migrasi Penduduk	0.718	0.282
Lahan Perkotaan (0,075)	Penggunaan Lahan	0.459	0.541
Sarana Prasarana (0,356)	Kondisi Bangunan (0,084)	0.802	0.198
	Kondisi Jalan (0,087)	0.403	0.597
	Kondisi Drainase (0,140)	0.325	0.675
	Kondisi Air Bersih (0,160)	0.198	0.802

Kriteria	Sub Kriteria	Pencegahan	Peningkatan Kualitas
	Kondisi Limbah (0,100)	0.167	0.833
	Kondisi Persampahan (0,180)	0.138	0.862
	Kondisi Proteksi Kebakaran (0,250)	0.108	0.892
Sosial Ekonomi (0,418)	Jumlah Penduduk (0,049)	0.634	0.366
	Tingkat Pendidikan (0,135)	0.602	0.398
	Tingkat Kesehatan (0,100)	0.686	0.314
	Pendapatan Masyarakat (0,504)	0.458	0.542
	Jenis Pekerjaan (0,211)	0.618	0.382
Tata Ruang (0,106)	Simpangan Pola Ruang dan Penggunaan Lahan	0.607	0.393

Sumber: Hasil Analisis, 2022

46.4% Pencegahan

53.6% Peningkatan Kualitas

Gambar 4.18 Rekapitulasi Strategi Penanganan Kumuh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa strategi penanganan kumuh di Kawasan Biringjene yaitu dengan kegiatan peningkatan kualitas. Maka untuk mendapatkan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menggunakan analisis deskriptif kualitatif sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018.

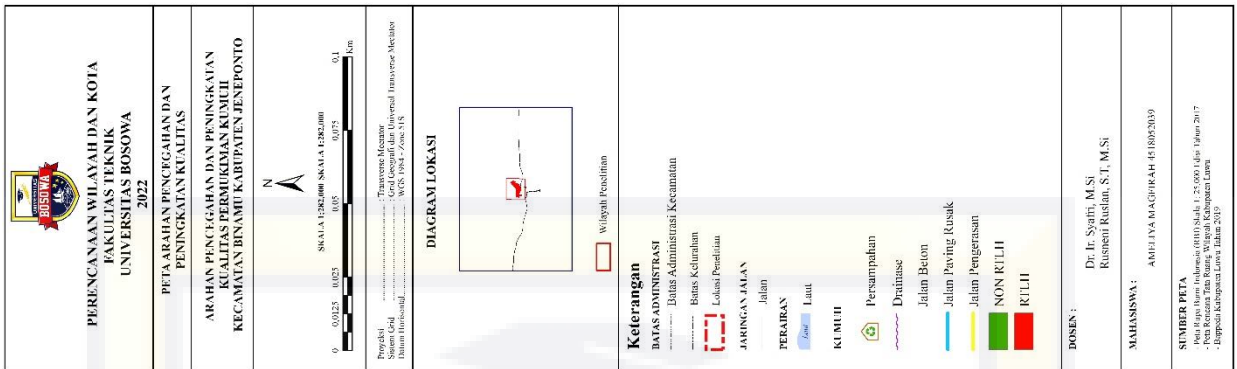
Tabel 4.19 Perumusan Arah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Kawasan Kumuh	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Biringjene	Urbanisasi	Tingginya tingkat urbanisasi di Kabupaten Jeneponto	Pengawasan Pengendalian	-	Melakukan pendataan mengenai urbanisasi dan pengendalian migrasi masuk dan keluar	
	Lahan Perkotaan	Meningkatnya kawasan permukiman		Pemugaran		Rehabilitasi bangunan gedung
	Bangunan Gedung	288unit bangunan yang tidak layak huni	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Kampanye lingkungan rumah sederhana sehat	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali seusai kondisi semula Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bangunan tidak layak huni
	Jalan Lingkungan	1.249,49 m jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis	Pengawasan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai standar jalan lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman

Kawasan Kumuh	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Air Minum	188 unit rumah tidak dapat mengakses air minum	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Penyediaan jaringan air minum Peningkatan kapasitas air minum permukiman
	Drainase Lingkungan	Saluran Drainase lingkungan yang tidak berfungsi optimal dengan panjang 1.249,49 Meter	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai kebersihan lingk.	Peningk. kapasitas saluran drainase permukiman
		Pembangunan Drainase lingkungan dengan Panjang 1.249,49 Meter	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	-	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai pembangunan drainase lingk.	-
	Saluran Air Limbah	tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Penyediaan saluran air limbah permukiman Peningkatan kapasitas saluran air limbah permukiman
	Proteksi Kebakaran	tidak memiliki proteksi kebakaran	Pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pencegahan penanggulangan kebakaran 	Penyediaan hydrant kebakaran pada unit-unit lingkungan permukiman

Kawasan Kumuh	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	RTH	tidak terdapat lahan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan • Pengendalian • Pemberdayaan masyarakat 	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan RTH privat pada unit-unit lingkungan permukiman 	Penyiapan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau publik
	Tingkat Pendidikan	Masih rendahnya tingkat pendidikan	Pengawasan dan Pemberdayaan masyarakat		Melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan	
	Pendapatan masyarakat	Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan jenis pekerjaan yang ditekuni	Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pelatihan bagi masyarakat angkatan kerja terkait keterampilan yang aplikatif sehingga menjadi modal mencari pekerjaan • Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi UMKM 	
	Jenis Pekerjaan					
	Tata ruang	Luasnya simpangan pola ruang dan kondisi eksisting karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai KKPR	Pemberdayaan Masyarakat		Pemberian sosialisasi tentang pentingnya KKPR	

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4.19 Peta Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses dalam penelitian, menghasilkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* menunjukkan bahwa menurut pendapat para *expert*, faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu yaitu faktor sosial ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak bekerja dan rendahnya tingkat pendidikan.
2. Arahkan pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu untuk variabel urbanisasi yaitu pencegahan dengan pola pengawasan dan pengendalian sedangkan untuk variabel lahan perkotaan dengan konsep peningkatan kualitas dengan pola pemugaran. Untuk variabel sarana prasarana dengan arahan penanganan berupa pencegahan dan peningkatan kualitas dengan pola pengawasan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat, pemugaran, dan peremajaan. Untuk variabel sosial budaya dengan arahan penanganan berupa

pencegahan dengan pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk variabel tata ruang dengan arahan pencegahan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini agar ditindak lanjuti secara nyata, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini memeperlihatkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan variabel yang digunakan, sehingga terdapat juga variabel yang berpengaruh dari luar terhadap pengaruh terbentuknya permukiman kumuh.
2. Diharapkan kepada studi selanjutnya sebaiknya mencari variabel baru dari penataan Kawasan permukiman kumuh, tidak hanya mengacu pada variabel sosial ekonomi dan faktor fisik lingkungan saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat terlihat menarik untuk di kaji dan dibahas
3. Perlu adanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan ataupun penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan munculnya temuan-temuan baru yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsa, E. (2017, April 27). *Isu Strategis Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kota Banda Aceh*.
<https://perkim.bandaacehkota.go.id/2017/04/27/isu-strategis-pembangunan-perumahan-rakyat-dan-kawasan-pemukiman-di-kota-banda-aceh/>
- Astuti, S. (2004). Menumbuhkan Perekonomian Desa, Solusi Untuk Meningkatkan Kualitas Perumahan Kota. *Jurnal Penelitian Permukiman*, 20(1)
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kecamatan Binamu dalam Angka 2020. Jenepono: Badan Pusat Statistik
- Business for Social Responsibility. (2011). *Stakeholder Mapping*.
www.bsr.org
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). PT. Pustaka Pelajar.
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Hariyanto, A. (2010). Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat (contoh kasus: Kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, 7(2), 27.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERADAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI SURAKARTA. *Desa-Kota*, 1(1), 24.
<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
- Ma, L., Wang, L., Wu, K.-J., & Tseng, M.-L. (2018). Assessing co-benefit barriers among stakeholders in Chinese construction industry. *Resources, Conservation and Recycling*, 137, 101–112.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.05.029>

- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa*. UGM Press.
- Perkim. (2021, Februari 11). Isu dan Tantangan Penyediaan Perumahan. *perkim.id*. <https://perkim.id/tantangan-penyediaan-perumahan/isu-dan-tantangan-penyediaan-perumahan/>
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 14 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Rindarjono, M. G. (2017). "SLUM" Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial. Media Perkasa.
- Rindarjono, Moh. G. (2016). Residential Mobility di Pinggiran Kota Semarang Jawa Tengah (Studi Kasus Kaum Miskin Kota di Kota Semarang). *Forum Geografi*, 21(2), 135. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v21i2.2358>
- Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process—What it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 9(3–5), 161–176. [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(87\)90473-8](https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8)
- Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah*. Bumi Aksara.
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23 ed.). Penerbit Alfabeta.
- Suparno, L. A. M., Baharuddin, F., & Doviyanto, R. (2021). Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Loh Sumber Kabupaten Kutai Kartanegara. *Cantilever: Jurnal Penelitian dan Kajian Bidang Teknik Sipil*, 10(1), 45–52. <https://doi.org/10.35139/cantilever.v10i1.83>
- Surtiani, E. E. (2006). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*. Diponegoro University.

Surya, B. (2018). *Transformasi Spasial & Kota Berkelanjutan* (1 ed.). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Suud, B., & Navitas, P. (2015). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKUMUHAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN TANAH KALIKEDINDING, KECAMATAN KENJERAN, SURABAYA. *JURNAL TEKNIK ITS*, 4(1).
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v4i1.8994>

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Yudohusodo, S. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta.



Lampiran I. Kuesioner Penelitian

KUESIONER WAWANCARA AHP

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Ameliya Magfirah selaku mahasiswi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa angkatan 2018 sedang melakukan penelitian yang berjudul **Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto** sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

1. Identitas Responden

Nama :
Dinas/Badan/Institusi :
Jabatan :

2. Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan faktor-faktor penyebab kekumuhan yang diprioritaskan untuk dilakukan pencegahan dan ditingkatkan kualitasnya. Pembobotan kriteria dibagi ke dalam 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu agak lebih penting dibanding elemen yang kedua
5	Elemen yang satu lebih penting dibanding elemen yang kedua
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dibanding elemen yang kedua
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dibanding elemen yang kedua
2,4,6,8	Nilai-nilai antara diantara dua nilai yang berdekatan
Kebalikan	Jika aktivitas I mendapat suatu angka terhadap j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i

Contoh:

Manakah yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan pencegahan dan ditingkatkan kualitasnya dari faktor-faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene di bawah ini?

Faktor A	Pembobotan																Faktor B	
Tata Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kualitas Bangunan

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa kualitas bangunan lebih diprioritaskan untuk dilakukan pencegahan dan ditingkatkan kualitasnya dibandingkan dengan kondisi tata bangunan.

Dengan ini, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab daftar pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan persepsi Bapak/Ibu.

3. Perbandingan Level 1

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor penyebab kekumuhan. Kriteria ini disusun berdasarkan variabel yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya:

No.	Faktor	Deskripsi
1	Urbanisasi	Urbanisasi merupakan migrasi dari luar kota menuju pusat kota
2	Lahan Perkotaan	Lahan perkotaan terdiri dari penggunaan lahan
3	Sarana Prasarana	Sarana prasarana terdiri dari 7 indikator kumuh yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi air bersih, kondisi drainase, kondisi air limbah, kondisi persampahan, kondisi proteksi kebakaran
4	Sosial Ekonomi	Sosial ekonomi terdiri dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, pendapatan masyarakat dan jenis pekerjaan
5	Tata Ruang	Tata ruang terdiri atas struktur ruang kota

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Urbanisasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lahan Perkotaan
Urbanisasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sarana Prasarana
Urbanisasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial Ekonomi
Urbanisasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tata Ruang
Lahan Perkotaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sarana Prasarana
Lahan Perkotaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial Ekonomi
Lahan Perkotaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tata Ruang
Sarana Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial Ekonomi
Sarana Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tata Ruang
Sosial Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tata Ruang

4. Perbandingan Level 2

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa sub-variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor penyebab kekumuhan. Kriteria ini disusun berdasarkan variabel yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah daftar sub-variabel serta deskripsinya:

a. Sarana Prasarana

No.	Faktor	Deskripsi
1	Kondisi Bangunan	Kondisi bangunan ditinjau dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis
2	Kondisi Jalan	Kondisi jalan ditinjau dari jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan permukiman dan kualitas permukaan jalan yang buruk
3	Kondisi Drainase	Kondisi drainase ditinjau dari drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, ketersediaan drainase dan kualitas drainase yang buruk
4	Kondisi Air Bersih	Kondisi air bersih ditinjau dari ketidaktersediaan akses air bersih dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih setiap orang
5	Kondisi Air Limbah	Kondisi air limbah ditinjau dari sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6	Kondisi Persampahan	Kondisi persampahan ditinjau dari prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

No.	Faktor	Deskripsi
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Kondisi proteksi kebakaran terdiri atas ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Faktor A	Pembobotan															Faktor B		
Kondisi Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Jalan
Kondisi Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Drainase
Kondisi Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Bersih
Kondisi Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Limbah
Kondisi Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Persampahan
Kondisi Bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Proteksi Kebakaran
Kondisi Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Drainase
Kondisi Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Bersih
Kondisi Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Limbah
Kondisi Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Persampahan
Kondisi Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Proteksi Kebakaran
Kondisi Drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Bersih
Kondisi Drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Limbah
Kondisi Drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Persampahan

Faktor A	Pembobotan																Faktor B	
Kondisi Drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Proteksi Kebakaran
Kondisi Air Bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Air Limbah
Kondisi Air Bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Persampahan
Kondisi Air Bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Proteksi Kebakaran
Kondisi Air Limbah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Persampahan
Kondisi Air Limbah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Proteksi Kebakaran
Kondisi Persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi Proteksi Kebakaran

b. Sosial Ekonomi

No.	Faktor	Deskripsi
1.	Jumlah Penduduk	Jumlah manusia yang bermukim pada suatu lingkungan
2.	Tingkat Pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh masyarakat
3.	Tingkat Kesehatan	Rata-rata angka kesehatan lingkungan masyarakat
4.	Pendapatan Masyarakat	Rata-rata jumlah pendapatan masyarakat per bulan
5.	Jenis Pekerjaan	Rata-rata jenis pekerjaan masyarakat

Faktor A	Pembobotan																Faktor B	
Jumlah Penduduk	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat Pendidikan
Jumla Penduduk	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat Kesehatan

Faktor A	Pembobotan																Faktor B	
Jumlah Penduduk	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendapatan Masyarakat
Jumlah Penduduk	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis Pekerjaan
Tingkat Pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat Kesehatan
Tingkat Pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendapatan Masyarakat
Tingkat Pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis Pekerjaan
Tingkat Kesehatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendapatan Masyarakat
Tingkat Kesehatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis Pekerjaan
Pendapatan Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis Pekerjaan

Lampiran 2. Analisis Stakeholder

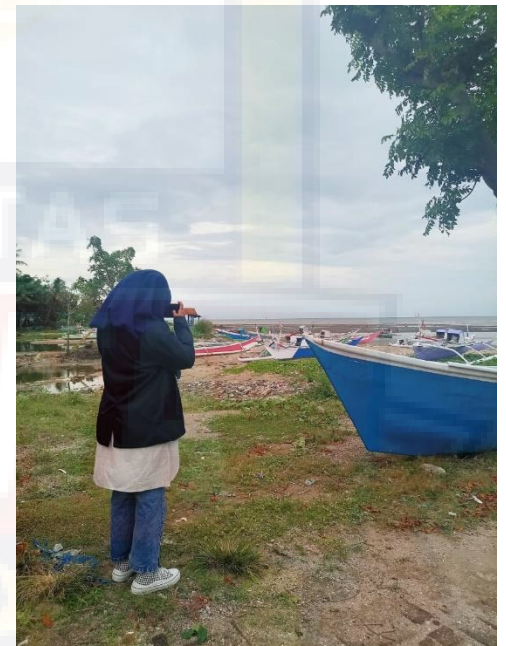
Pihak Terkait dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

No	Stakeholder	Langsung	Tidak Langsung
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	✓	
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	✓	
4.	Dosen PWK Universitas Bosowa		✓
5.	Lurah Pabiringa	✓	
6.	Ketua Lingkungan Tanrusampe Barat dan Timur	✓	

Analisis Stakeholder dengan Kriteria PIL (Power-Interest-Legitimacy) dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

No	Stakeholder	Power		Interest		Legitimacy		Kategori	Peran
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil		
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	✓			✓	✓		PL	Utama
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓		✓		✓		PIL	Utama
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	✓		✓		✓		PIL	Utama
4.	Dosen PWK Universitas Bosowa		✓	✓			✓	I	Pendukung
5.	Lurah Pabiringa	✓		✓		✓		PIL	Utama
6.	Ketua Lingkungan Tanrusampe Barat dan Timur	✓			✓	✓		PL	Utama

Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Observasi dan Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ameliya Magfirah lahir di Makassar, 23 Mei 2000, merupakan putri kedua dari 3 bersaudara pasangan dari Muhammad Syarif, S.H dan Basmawati. Alamat rumah di Griya Prima Tonasa D2/7, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Dengan riwayat pendidikan yakni Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Unhas (Tahun 2005-2006).

Sekolah Dasar Inpres Kampus Unhas I (Tahun 2006-2012). Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Makassar (Tahun 2012-2015). Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar (Tahun 2015-2018). Melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta Universitas Bosowa Makassar melalui jalur regular dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar, setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 3 tahun 11 bulan yaitu pada tahun 2022.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Penulis juga aktif dalam organisasi pengurus di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama satu periode yakni menjabat sebagai anggota dibidang Hubungan Masyarakat Periode 2021-2022. Penulis juga pernah aktif di kepanitiaan kegiatan Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) sebagai Sekretaris Planonight Angkatan 2018 dan Sekretaris Musyawarah Besar ke XXXIII.